

RENCANA KERJA TAHUN
2024

**DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA
PROVINSI NTT**



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah dokumen perencanaan tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2024.

Di era globalisasi dewasa ini peran bidang komunikasi dan informatika, dalam bentuk kehadiran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), sudah menjadi tuntutan kebutuhan baik di lingkungan pemerintahan, swasta maupun masyarakat dan individu yang pada akhirnya akan mewujudkan konsep masyarakat informasi. Penyusunan Renja Dinas mengacu kepada kebutuhan dan permasalahan pembangunan untuk meningkatkan kualitas proses pelayanan dari lembaga pemerintah kepada masyarakat melalui pelayanan digital, termasuk layanan *online* sehingga melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang memiliki sejumlah komponen pengungkit antara lain dukungan infrastruktur, dukungan kebijakan dan tata kelola, dukungan SDM TIK yang profesional, dukungan keamanan informasi SPBE, dukungan keterbukaan informasi publik penyelenggaraan pemerintahan, sehingga diharapkan akan tercipta tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, efisien dan efektif dalam manajemen pemerintahan dan pelayanan publik.

Dalam upaya memenuhi kebutuhan dan permasalahan tersebut, penyusunan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika disesuaikan dengan potensi sumber daya tersedia, dalam rangka mengakomodasikan pencapaian target dan sasaran yang tercantum di dalam RKPD dan menjaga kesinambungan pembangunan sebagaimana yang diarahkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2018-2024.

Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian menjadi sektor andalan Dinas Kominfo Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam membangun Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk bangkit mewujudkan masyarakat sejahtera. Peran tersebut ditempuh melalui perumusan, pelaksanaan, pemantauan, monitoring dan pelaporan kebijakan dalam pengelolaan informasi serta komunikasi publik, penataan dan pengawasan penyelenggaraan system pemerintahan berbasis elektronik, penyelenggaraan statistik sektoral, penyelenggaraan persandian dan pengamanan informasi SPBE.

1.2 Landasan Hukum

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Pembangunan Jangka Nasional Tahun 2005-2025;
- 6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
- 7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
 - 11) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 - 12) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 - 13) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 - 14) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
 - 15) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);
 - 16) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
 - 17) Peraturan Presiden RI Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 - 18) Instruksi Presiden RI Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government.

- 19) Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- 20) Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor Nomor 2 Tahun 2019 tentang RPJMD 2018-2024
- 21) Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2020 tentang RPJMD Perubahan Tahun 2018 - 2024
- 22) Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 39 Tahun 2018 Tentang Tata Kelola Pengembangan e-Government Provinsi NTT.
- 23) Peraturan Gubernur NTT Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT;
- 24) Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 115 Tahun 2019 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
- 25) Peraturan Gubernur Nomor 116 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 adalah untuk :

- a. Menentukan arah kebijakan pembangunan Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Tahun 2024.
- b. Mewujudkan sinergitas rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Tahun 2024.
- c. Menjabarkan rencana strategis Dinas Komunikasi dan Informatika dalam rencana strategis SKPD jangka pendek (1 tahun)

Adapun tujuannya adalah untuk :

- a. Memberikan landasan operasional bagi Bidang dan Sekretariat lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

- b. Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.
- c. Menjadi landasan penyusunan usulan APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024 melalui penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024.
- d. Mewujudkan efektifitas kegiatan dalam penyelenggaraan pendayagunaan bidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur mengacu pada sistematika sebagaimana termuat di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pada Lampiran VI sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

Bab II : Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Diskominfo Tahun Lalu dan Capaian Renstra
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Diskominfo
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Diskominfo.
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Bab III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Komunikasi dan Informatika

Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab V : Penutup

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Dalam Rencana Strategi (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT Tahun 2018 - 2024, telah menetapkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program serta Kegiatan sehingga berdasarkan hasil Pengukuran Capaian Kinerja, maka sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022, dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 2.1.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika dan Pencapaian Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Sampai dengan Tahun 2023.

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome)/ Kegiatan / (Output)	Target Capaian Kinerj Renstra PD Tahun 2023	Realisasi terget Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2022			Target Program/Kegia tan Renja PD Tahun berjalan Tahun 2023	Prakiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan	
					Target Renja Tahun tahun 2022	Realisasi Renja Tahun tahun 2022	Tingkat Realisasi %		Perkiraan realisasi capaian	Perkiraan tingkat capaian %
2.16	URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA									
2.16.02	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Tingkat Keterbukaan Informasi Publik (Skor)	90 (Informatif)	88,38	85	76,99	90%	90 (Informatif)	90 (Informatif)	100
		Jumlah PD yang memiliki website untuk Terselenggaranya pengelolaan data dan informasi berbasis web	39 OPD	39 OPD	39 OPD	39 OPD	39 OPD	39 OPD	39 OPD	100

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome)/ Kegiatan / (Output)	Target Capaian Kinerj Renstra PD Tahun 2023	Realisasi terget Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2022			Target Program/Kegia tan Renja PD Tahun berjalan Tahun 2023	Prakiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan	
					Target Renja Tahun tahun 2022	Realisasi Renja Tahun tahun 2022	Tingkat Realisasi %		Perkiraan realisasi capaian	Perkiraan tingkat capaian %
2.16.03	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Indeks Sistem pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) lingkup Pemerintah Prov.NTT	2,7	2,28	2,3	3,55	154%	2,7	2,7	100 %
		Persentase cakupan internet di Perangkat Daerah / <i>Pembangunan Jaringan LAN dan Jaringan Intranet terintegrasi Pemerintah Provinsi melalui NOC</i>	100%	100	75%	75%	100%	100	100	100%
		Persentase cakupan internet di <i>Taurism Estate</i>	100%	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.20	URUSAN BIDANG STATISTIK									
2.20.02	Program	Cakupan Pemenuhan	100 %	100%	100 %	100%	100%	100 %	100 %	100 %

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome)/ Kegiatan / (Output)	Target Capaian Kinerj Renstra PD Tahun 2023	Realisasi terget Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2022			Target Program/Kegia tan Renja PD Tahun berjalan Tahun 2023	Prakiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan	
					Target Renja Tahun tahun 2022	Realisasi Renja Tahun tahun 2022	Tingkat Realisasi %		Perkiraan realisasi capaian	Perkiraan tingkat capaian %
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Kebutuhan Data Statistik Sektoral untuk Perencanaan Pembangunan Sektoral								
2.20	URUSAN BIDANG STATISTIK									
2.20.02	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Data Statistik Sektoral untuk Perencanaan Pembangunan Sektoral	100 %	100%	100 %	100%	100%	100 %	100 %	100 %
		Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Data Statistik Sektoral untuk Evaluasi Hasil Pembangunan Sektoral	100 %	100%	100 %	100%	100%	100 %	100 %	100 %
2.21	URUSAN BIDANG PERSANDIAN									

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome)/ Kegiatan / (Output)	Target Capaian Kinerj Renstra PD Tahun 2023	Realisasi terget Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2022			Target Program/Kegia tan Renja PD Tahun berjalan Tahun 2023	Prakiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan	
					Target Renja Tahun tahun 2022	Realisasi Renja Tahun tahun 2022	Tingkat Realisasi %		Perkiraan realisasi capaian	Perkiraan tingkat capaian %
2.21.02	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Tingkat Pengamanan Informasi Daerah	90 / 5 (Sangat Baik)	68,01%	76%	77,50	101%	76 / 4-4,9 (Baik)	90 / 5 (Sangat Baik)	100 %

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Diskominfo Tahun 2022

Analisis terhadap Indikator Kinerja tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- 1) Indeks ketersediaan layanan Sistem pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) lingkup Pemerintah Prov.NTT.

Dalam rangka mendukung pencapaian indeks SPBE didukung oleh pelaksanaan kegiatan Pengembangan layanan e government dengan sub kegiatan berupa evaluasi internal penyelenggaraan SPBE di lingkup Pemerintah, pengembangan dan pemeliharaan aplikasi eNadi, e-absensi dan webmail nttprov.go.id , agenda pimpinan, Integrasi Tanda Tangan Elektronik.

Berdasarkan hasil evaluasi Eksternal oleh Kementerian Pendayagunaan dan Aparatur Negara, Realisasi indeks SPBE Provinsi NTT tahun 2022 adalah sebesar 3.55. Nilai tersebut meningkat sebesar 1,27 indeks point dari realisasi tahun 2021 sebesar 2,28.

- 2) Tingkat Keterbukaan Informasi Publik

Proses evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur telah dilakukan oleh Komisi Informasi pada bulan Oktober 2022 .Tingkat Keterbukaan Informasi Publik lingkup Pemerintah Provinsi NTT pada tahun 2022 adalah 76,99 % dari target yang ditetapkan sebesar 85%. Berdasarkan hasil Evaluasi tersebut, dapat dilihat bahwa capaian kinerja Keterbukaan Informasi Publik tahun 2022 tidak mencapai target yang ditetapkan. Jika dibandingkan dengan tahun 2021 maka Tingkat Keterbukaan Informasi Publik tahun 2022 mengalami penurunan capaian kinerja sebesar 11,39% dimana pada tahun 2021 mencapai angka 88,38. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu :

- Adanya eror system pada saat penginputan data dukungan pada aplikasi E-Monev Komisi Informasi Pusat sehingga mengakibatkan terjadinya ketidaksesuaian antara jawaban yang diupload dan pertanyaan yang tersedia.
- Sebagian besar perangkat daerah Lingkup Pemprov NTT tidak mempublikasikan dokumen informasi publik pada website dan media sosial sehingga mengakibatkan banyak pertanyaan yang dijawab tanpa didukung oleh dokumen pendukung.
- Jumlah pertanyaan yang pada tahun 2022 meningkat sebanyak 192 pertanyaan dimana pada tahun 2021 hanya 63 pertanyaan.

Salah satu media yang dimanfaatkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dalam mengimplementasi Keterbukaan Informasi Publik adalah dengan mengoptimalkan peran dan fungsi PPID utama dan PPID pembantu PPID melalui *website* PPID. *Website* ini dipilih sebagai media untuk menyampaikan data/informasi karena *website* merupakan salah satu media pelayanan publik yang dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat. Sampai dengan tahun 2022 data/informasi yang dapat diakses pada *website* PPID Kominfo mencapai 533 dokumen informasi berkala, 60 dokumen informasi serta merta, 240 dokumen informasi setiap saat. Adapun 1 permohonan informasi yang masuk, 3 permohonan yang telah didisposisi, 24 permohonan informasi yang telah diproses dan juga 1 permohonan keberatan. Data/informasi yang dipublikasi pun adalah data/informasi yang akurat, tepat waktu, relevan, lengkap, benar dan *up to date*.

3) Indeks Kematangan Keamanan Informasi

Implementasi Tingkat Pengamanan Informasi Daerah lingkup Pemerintah Provinsi NTT pada tahun 2022 adalah dengan tersedianya Dokumen terkait Perumusan Kebijakan Pengamanan Informasi Daerah sebanyak 3 Dokumen yaitu 2 Peraturan Gubernur dan 1 Rancangan Peraturan Gubernur Jika dibandingkan dengan kondisi tahun 2020 maka terjadi peningkatan sebesar 100 %.

Hal ini disebabkan oleh adanya Kesadaran Pemerintah akan pentingnya penyelenggaraan pengamanan informasi agar keutuhan informasi dapat terjaga dari segala ancaman melalui persandian. Salah satu upaya yang dilakukan mendorong perkembangan teknologi dan informasi adalah dengan Perumusan kebijakan tentang pengamanan informasi dengan diterbitkannya peraturan perundang-undangan, antara lain :

- Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pola Hubungan Komunikasi Sandi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- Rancangan Peraturan Gubernur tentang Manajemen Keamanan Informasi.

Perumusan kebijakan tentang pengamanan informasi dilakukan menjamin keamanan informasi dalam penyelenggaraan transaksi dengan pihak-pihak lain, terutama yang berkaitan dengan kerahasiaan informasi dan transaksi finansial.

4) Persentase cakupan internet di Tourism Estate

Persentase cakupan internet di Tourism Estate lingkup Pemerintah Provinsi NTT pada tahun 2022 adalah 100 % dimana tersedianya jaringan internet di 7

(tujuh) destinasi pariwisata. Dalam rangka pemerataan akses komunikasi dan layanan internet, melalui koordinasi dan peran aktif serta kolaborasi Dinas dengan Kementrian Kominfo dalam hal ini BAKTI telah melakukan pembangunan BTS pada daerah 3T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar) dan Non 3T. Untuk wilayah 3T sampai pada tahun 2022 adalah 421 BTS 4G/LTE di 421 desa tersebar di 16 Kabupaten.

Tabel 2.2
Potret Persebaran Pembangunan Dan Penyediaan

No	Kabupaten/Kota	Jumlah
1	Alor	33
2	Ende	59
3	Kupang	24
4	Lembata	31
5	Manggarai	31
6	Manggarai Barat	24
7	Manggarai Timur	66
8	Nagekeo	1
9	Rote Ndao	15
10	Sabu Raijua	3
11	Sumba Barat	4
12	Sumba Barat Daya	1
13	Sumba Tengah	21
14	Sumba Timur	89
15	Timor Tengah Selatan	15
16	Timor Tengah Utara	4
TOTAL		421

Pembangunan BTS ini telah dilakukan sejak awal bulan agustus 2022 dan diperkirakan seluruhnya akan selesai pada bulan desember 2022. Untuk wilayah Non 3T, pembangunan BTS dilakukan oleh pihak operator seperti PT.Telkomsel, PT XL Axiata, dan PT. Indosat. Penyediaan akses layanan internet sebanyak **421** titik yang tersebar di 21 Kabupaten yang telah dialokasikan pada lokasi :

- 1. Pendidikan
- 2. Destinasi pariwisata
- 3. Pemerintahan Desa
- 4. Pelayanan Kesehatan
- 5. UMKM

Penyediaan akses layanan internet sebanyak **852** titik yang tersebar di 21 Kabupaten yang telah dialokasikan pada lokasi :

- 6. Pendidikan
- 7. Destinasi pariwisata
- 8. Pemerintahan Desa
- 9. Pelayanan Kesehatan
- 10. UMKM

Sampai dengan akhir Tahun 2020 dibangun BTS USO dengan kualitas layanan 4G On Air sudah diresmikan pada 151 lokasi dengan rincian :

- 1. 133 tersebar di 20 Kabupaten 4G.
- 2. 18 tersebar di destinasi super prioritas Manggarai Barat

5) Persentase cakupan internet di Perangkat Daerah

Persentase layanan akses internet dilingkup Pemerintah Provinsi NTT pada tahun 2022 adalah sebanyak 100% atau 39 dari 39 Perangkat Daerah. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan pelayanan langsung kepada Perangkat Daerah Terkait berupa layanan akses internet dedicated dan Layanan akses Internet Video Conference.

Tabel 2.3
Daftar Penyediaan Cakupan Layanan Internet Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur

NO	PERANGKAT DAERAH	Jenis Cakupan Layanan Internet		Keterangan
		Layanan Akses Internet Dedicated	Layanan Akses Internet Video Conference	
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur		✓	
2	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur		✓	
3	Dinas Penanaman Modal Provinsi Nusa Tenggara Timur		✓	
4	Dinas Pemberdaya Provinsi Nusa Tenggara Timur		✓	
5	Dinas Kesehatan Provinsi		✓	

NO	PERANGKAT DAERAH	Jenis Cakupan Layanan Internet		Keterangan
		Layanan Akses Internet Dedicated	Layanan Akses Internet Video Conference	
	Nusa Tenggara Timur			
6	RSUD Prof. DR. W.Z. Johannes Kupang		✓	
7	Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	✓	✓	
8	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur		✓	
9	Dinas Pertenakan Provinsi Nusa Tenggara Timur		✓	
10	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur		✓	
11	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur	✓	✓	Penyediaan layanan Akses Internet Dedicated di Dinas Kominfo, Palapa Room, Ruang Komisi Invormasi Prov NTT, Ruang Komisi Penyiaran Informasi Daerah Prov.NTT
12	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Trasmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur		✓	
13	Dinas Kelautan dan		✓	

NO	PERANGKAT DAERAH	Jenis Cakupan Layanan Internet		Keterangan
		Layanan Akses Internet Dedicated	Layanan Akses Internet Video Conference	
	Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur			
14	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur		✓	
15	Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur		✓	
16	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur		✓	
17	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur		✓	
18	Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur		✓	
19	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur		✓	
20	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur		✓	
21	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur		✓	
22	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur		✓	
23	Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur		✓	
24	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	✓	✓	
25	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Nusa Tenggara		✓	

NO	PERANGKAT DAERAH	Jenis Cakupan Layanan Internet		Keterangan
		Layanan Akses Internet Dedicated	Layanan Akses Internet Video Conference	
	Timur			
26	Badan Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur		✓	
27	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur		✓	
28	Badan Pengelola Perbatasan Provinsi Nusa Tenggara Timur		✓	
29	Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		✓	
30	Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		✓	
31	Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		✓	
32	Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur	✓	✓	Penyediaan Layanan Akses Internet Dedicated di Ruang Sekretariat Dewan (Setwan)
33	Biro Umum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	✓	✓	Penyediaan Layanan Akses Internet Dedicate di Ruang Asisten, Ruang Rapat

NO	PERANGKAT DAERAH	Jenis Cakupan Layanan Internet		Keterangan
		Layanan Akses Internet Dedicated	Layanan Akses Internet Video Conference	
				Asisten I,II,III, Ruang Rapar Gubernur, Ruang Rapat Sekretaris Daerah, Ruang Staf Ahli, Ruang Staf Khusus, Aula Ferdandez, RUmah Jabatan Gubernur dan Aula eltari
34	Biro Ekonomi dan Kerjasama Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur		✓	
35	Biro Hubungan Masyarakat dan Pertokol Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur		✓	
36	Biro Pengadaan Barang dan Jasa		✓	
37	Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur		✓	
38	Biro Organisasi Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur		✓	
39	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur		✓	

- 6) Terlaksananya Reformasi Birokrasi di lingkup Dinas Kominfo Provinsi NTT
- Terlaksananya Reformasi Birokrasi di lingkup Dinas Kominfo Provinsi NTT
- Reformasi birokrasi pada dasarnya untuk menciptakan birokrasi pemerintahan yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas dari KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Pada tahun 2022 implementasi Reformasi Birokrasi lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika mencapai 100 %. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dinas Kominfo Tahun 2022 oleh TPI dalam hal ini Biro Organisasi Setda Provinsi NTT adalah sebesar 87,86, meningkat 11,91 point dari tahun 2020 yaitu 75,95 (kategori “BB”). Hal ini menunjukkan bahwa ada upaya-upaya perbaikan yang dilakukan di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika untuk menghasilkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Tabel 2.4.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT

	Indikator (IKU, SPM, IKK)	Angka/Nilai Target/Standard (IKU, SMP, IKK)	Target Renstra PD			Realisasi Capaian		Proyeksi	Catatan Analisis
			Tahun 2022	Tahun 2022	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2022	Tahun 2024	
1	2	3	4	4	5	7	8	9	10
1.	Indeks Penyelenggaraan SPBE	5	2,3	2,5	2,7	3,26	2,28	2,7	
2.	Tingkat Keterbukaan Informasi Publik (skor)	100 Informatif	65 (Kurang Informatif)	75 Menuju Informatif	100 Informatif	59,65	88,38	100	
3	Jaringan LAN dan Jaringan Intranet terintegrasi Pemerintah Provinsi melalui NOC	100 %	50%	75%	100 %	100%	100%	100	
4	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Data Statistik Sektoral untuk Perencanaan Pembangunan	100 %	100%	100 %	100 %	-	100%	100	

	Indikator (IKU, SPM, IKK)	Angka/Nilai Target/Standard (IKU, SMP, IKK)	Target Renstra PD			Realisasi Capaian		Proyeksi	Catatan Analisis
			Tahun 2022	Tahun 2022	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2022	Tahun 2024	
1	2	3	4	4	5	7	8	9	10
	Sektoral dan Evaluasi Hasil Pembangunan Sektoral								
5	Tingkat pengamanan informasi daerah	100 / 5/ Sangat Baik	61 / 3 – 3,9 (cukup)	76 / 4-4,9 (Baik)	90/5 (Sangat Baik)	66,6	68,01	90/5 (Sangat Baik)	

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Diskominfo.

2.3.1. Tingkat Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur mempunyai tugas pokok adalah ***membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.*** Dalam melaksanakan tugas dibidang komunikasi dan Informatika tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. perumusan kebijakan di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik;
4. pelaksanaan administrasi dinas di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya

2.3.2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi

Permasalahan yang dihadapi dalam rangka pembangunan dan pengembangan SPBE dan pencapaian target kinerja Dinas Kominfo sesuai Renstra dan RPJMD sebagai berikut:

1. Infrastruktur Jaringan TIK

Berdasarkan kondisi yang ada saat ini pembangunan infrastruktur jaringan pada masing-masing Perangkat Daerah di lingkup pemerintah Provinsi NTT masih menjadi hambatan karena masing-masing Perangkat Daerah membangun dan mengembangkan aplikasi dan jaringan TIK yang belum didukung dengan jaringan LAN serta Fiber Optik (FO), termasuk internet hal ini disebabkan karena ego sektoral dari masing-masing Perangkat Daerah yang membangunnya secara parsial. Hal ini telah memberikan konsekuensi logis, terkait hal-hal sebagai berikut :

- a. Terjadinya inefisiensi anggaran dalam pengelolaan *e-Government* baik pelaksanaan aplikasi maupun pemanfaatan jaringan internet;
- b. Telah menjadi kendala utama dalam rangka membangun konektivitas dan integrasi pengelolaan dan pelaksanaan *e-Government*;
- c. Aspek keamanan data dan informasi tidak dijamin untuk terlaksana dengan baik;
- d. Kualitas pelayanan publik akan menjadi tidak optimal dalam pelaksanaannya.

2. Aplikasi *e-Government*

Salah satu aspek dalam implementasi *e-Government* (SPBE) adalah ketersediaan informasi yang dapat menunjang kegiatan dan pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah. Pengelolaan data dan informasi yang dimiliki oleh pemerintah membutuhkan pengembangan sistem informasi secara elektronik untuk memberikan layanan informasi yang lebih efektif dan efisien dalam proses birokrasi. Proses memperoleh informasi tersebut diperoleh dari berbagai aplikasi informatika atau aplikasi sistem informasi. Aplikasi adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi layanan *e-Government* (SPBE). Dapat digambarkan bahwa kondisi saat ini terdapat beberapa aplikasi sistem informasi yang berada di lingkup Pemerintah Provinsi NTT, dimana aplikasi-aplikasi tersebut tersebar pada beberapa Perangkat Daerah.

Aplikasi *e-Government* (SPBE) di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur masih dikelola oleh masing-masing Perangkat Daerah dan belum terintegrasi. Kendala yang dialami saat ini terkait tata kelola sistem informasi, khususnya website, aplikasi umum antara lain tidak semua Perangkat Daerah memiliki unit khusus pengelola website, aplikasi yang belum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Disamping itu masih terdapat aplikasi umum yang dikelola Perangkat Daerah terkait yang dapat digunakan oleh seluruh Perangkat Daerah, namun masih belum terintegrasi dengan aplikasi penunjang lainnya.

3. Keamanan Informasi SPBE

Berdasarkan Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 7 tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan Informasi dilingkungan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, Persandian adalah kegiatan

dibidang pengamanan data/ informasi yang dilaksanakan dengan menerapkan konsep, teori, seni dan ilmu krypto beserta ilmu pendukung lainnya secara sistematis, metodologis dan konsisten serta terkait pada etika profesi sandi. Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota meliputi:

- a. Penyediaan analisis kebutuhan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi;
- b. Penyediaan kebijakan penyelenggara persandian untuk pengamanan informasi;
- c. Pengelolaan dan perlindungan informasi;
- d. Pengelolaan sumber daya Persandian meliputi sumber daya manusia, materiil sandi dan JKS serta anggaran;
- e. Penyelenggaraan operasional dukungan Persandian untuk pengamanan informasi;
- f. Pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pengamanan informasi melalui persandian di seluruh Perangkat Daerah; dan
- g. Koordinasi dan konsultasi penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan informasi.

Pengamanan Informasi sebagaimana dimaksud mencakup pengamanan fisik, pengamanan logis dan perlindungan secara administrasi.

Dengan semakin berkembangnya teknologi sistem informasi, mengelola keamanan teknologi informasi dan jaringannya akan menjadi semakin kompleks dan menantang. Pengamanan data/informasi harus memastikan terpenuhinya 3 syarat dasar sumber daya informasi, yaitu: (1) Kerahasiaan data/informasi; (2) Kebutuhan data/informasi dan (3). Ketersediaan data/informasi

Berdasarkan hasil assesment yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT dapat digambarkan sebagai berikut:

- 1) Keamanan aplikasi; untuk setiap aplikasi yang dikembangkan oleh Perangkat Daerah belum menjamin kerahasiaan data karena dikembangkan oleh pihak ketiga demikian dengan keamanan system aplikasi yang dikembangkan;
- 2) Keamanan jaringan; dalam jaringan computer hal yang tidak boleh dilupakan adalah masalah keamanan jaringan dan keamanan data, apalagi sistem yang dikembangkan oleh Perangkat Daerah masing-masing memiliki data yang sangat banyak. Untuk keamanan jaringan pada Perangkat Daerah berlangganan internet

dengan berbagai jenis seperti; speedy, indihome, wifi.id dan astinet. Hal ini menunjukkan bahwa Perangkat Daerah belum menggunakan Fiber Optic (F/O) ataupun VPN;

- 3) Keamanan Lingkungan, kondisi yang digambarkan pada saat ini menunjukkan bahwa setiap Perangkat Daerah yang mempunyai aplikasi tidak memiliki kewanamanan yang baik karena tidak menyediakan ruangan server, UPS, AC ruangan, ataupun genset sebagai cadangan apabila PLN padam.

4. SDM Pengelola TIK

Salah satu faktor penting dalam pelaksanaan implementasi *e-Government* (SPBE) di lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah ketersediaan sumber daya manusia. Apabila SDM yang tersedia tidak memenuhi standar yang diinginkan maka hal ini akan menghambat implementasi *e-Government* (SPBE).

Berbagai kasus ditemukan bahwa pelaksanaan dan implementasi *e-government* terkadang menjadi kendala disebabkan karena tidak tersedianya SDM teknis teknologi informasi yang dapat menjalankan serta mengelola *e-government*. Dari hasil assemen berdasarkan kuisioner yang telah diisi oleh Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi NTT bahwa secara keseluruhan kondisi SDM TIK sebagai berikut; Teknik informatika 16 orang; Teknik komputer 12 orang; Manajemen informatika 7 orang; Sistem Informasi 7 orang dan; Teknik Elektro 5 orang, hal ini menunjukkan bahwa jika ditinjau dari ketersediaan SDM belum cukup memadai, namun dalam kenyataan bahwa disisi lain SDM yang ada pada Perangkat Daerah seringkali terjadi merangkap tugas antara pegawai menyebabkan penerepan sistem menjadi kendala. Selain itu terdapat juga kendala lain yaitu para ASN belum dibekali dengan pemahaman akan teknologi informasi, dimana ditemukan bahwa mereka sangat minim mendapatkan pelatihan-pelatihan yang terkait dengan teknologi dan informasi hal ini akan berdampak pada pemanfaatan aplikasi yang ada pada Perangkat Daerah tersebut.

Dengan adanya perkembangan TI/ sistem informasi tersebut maka peningkatan kualitas SDM untuk pemahaman terhadap dan pengembangan dan pengelolaan TIK akan menjadi syarat mutlak supaya sistem yang telah dikembangkan menjadi berdaya guna.

5. Proses Audit Penerapan TIK di Provinsi NTT

Audit atau asesmen atas proses bisnis, dan audit teknologi informasi dan komunikasi dalam hal ini merupakan hal dasar yang perlu dilakukan dalam rangka menyusun Rencana Induk. Audit ini adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.

Dalam penyusunan Rencana Induk ini, audit dilakukan melalui survei terhadap TUPOKSI Dinas Kominfo Provinsi NTT, Program Kegiatan, hingga aset TIK yang dipunyai, untuk disesuaikan dengan kebutuhan ideal penerapan *e-Government* yang akan digunakan oleh pemerintah daerah, Aparatur Sipil di Provinsi NTT, perorangan, pelaku usaha dan semua pihak yang terkait dengan pemerintahan Provinsi NTT.

Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi terdiri atas: a.) audit: Infrastruktur, b.) audit Aplikasi; dan c.) audit Keamanan. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi tersebut meliputi pemeriksaan hal pokok teknis pada :

- a) Penerapan tata kelola dan manajemen teknologi informasi dan komunikasi;
- b) Fungsionalitas teknologi informasi dan komunikasi;
- c) Kinerja teknologi informasi dan komunikasi yang dihasilkan; dan
- d) Aspek teknologi informasi dan komunikasi lainnya.

Apabila mengacu kepada Perpres 95/2018, Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi nantinya harus dilaksanakan oleh lembaga pelaksana Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi pemerintah atau lembaga pelaksana Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan berdasarkan kebijakan umum penyelenggaraan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi, diatur oleh Menteri Kominfo.

Secara ideal pula, Audit Infrastruktur Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud diatas dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah..

Selain audit infrastruktur, juga diperlukan Audit keamanan Infrastruktur Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah; untuk audit keamanan Aplikasi Umum, audit keamanan Aplikasi Khusus. Nantinya, Audit keamanan dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit Keamanan, oleh lembaga cyber. Dalam melaksanakan

audit keamanan Infrastruktur, Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dan audit keamanan Aplikasi Khusus, Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika terkait pemantauan, evaluasi, dan pelaporan audit keamanan Infrastruktur Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dan audit keamanan Aplikasi Khusus.

6. Penyelenggaraan informasi dan komunikasi publik

Salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan SPBE untuk mendukung pelayanan publik adalah adanya pelayanan informasi dan komunikasi penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Kondisi yang dihadapi adalah pelayanan informasi dan komunikasi kepada publik belum optimal dilaksanakan berbasis TIK. PPID yang seyogyanya berperan sebagai wadah untuk menyiapkan informasi publik baik berupa profil perangkat daerah, program dan kegiatan serta capaian kinerja belum optimal mempublikasikan. Selain itu lembaga-lembaga yang perlu disiapkan sesuai amanat Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 untuk memfasilitasi terjadinya sengketa informasi juga belum dibentuk.

Proses komunikasi publik dan informasi publik yang seyogyanya juga dapat memanfaatkan kearifan lokal berbasis TIK sebagai media komunikasi dan informasi juga belum dapat dibentuk dan berperan secara optimal.

2.3.3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala Daerah

Visi : Nusa Tenggara Timur Bangkit Menuju Masyarakat Sejahtera Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia Visi ini dimaknai : <i>NTT harus Bangkit di bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik</i>				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH	Permasalahan pelayanan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Misi ke – 3 : Meningkatkan ketersediaan dan kualitas Infrastruktur di NTT. Misi ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas	Masing-masing Perangkat Daerah membangun dan mengembangkan aplikasi dan jaringan TIK, termasuk	- Belum terbangun kesepahaman dalam proses pembangunan dan pemanfaatan	- Telah dikeluarkan peraturan Gubernur NTT Nomor 39 Tahun

Visi : Nusa Tenggara Timur Bangkit Menuju Masyarakat Sejahtera Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia Visi ini dimaknai : <i>NTT harus Bangkit di bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik</i>				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH	Permasalahan pelayanan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	infrastruktur untuk mendukung berbagai aktivitas pelayanan publik dan kelancaran berbagai aktivitas perekonomian serta membuka aksesibilitas dan keterisolasian daerah-daerah perbatasan, pinggiran dan terisolir.	internet yang belum didukung dengan jaringan LAN dan FO. Hal ini disebabkan karena ego sektoral dari masing-masing Perangkat Daerah yang membangunnya secara parsial.	infrastruktur (jaringan internet) - Dukungan anggaran terbatas	2018 Tentang Tata Kelola Pengembangan e-Government Lingkup Pemerintah Provinsi NTT - Adanya Perpres RI Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
	Misi 4 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Ketersediaan SDM bidang TIK sesuai dengan kebutuhan (Programer, analis sistem, desain grafis,) di Lingkup Pemprov NTT belum tersedia sesuai kebutuhan	- Pola rekrutmen yang belum menjawab kebutuhan - Pelaksanaan bimtek yang belum mengakomodir kebutuhan	Telah adanya Rencana Induk Pengembangan e-Government (SPBE) didalamnya termasuk rencana kebutuhan dan pengembangan SDM bidang TIK
	Misi 5 : Menciptakan birokrasi yang professional dengan karakteristik yang adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas	- Dalam konteks SPBE Provinsi NTT berada pada peringkat terendah ke 33 se-Indonesia	- Pembangunan SPBE masih bersifat parsial - Belum terbentuk komitmen bersama untuk	- Adanya Perpres RI Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem

Visi : Nusa Tenggara Timur Bangkit Menuju Masyarakat Sejahtera Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia Visi ini dimaknai : <i>NTT harus Bangkit di bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik</i>				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH	Permasalahan pelayanan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	dan bersih KKN (indikator RPJMD : indeks Sistem pemerintahan Berbasis Elektronik/SPBE).	- Kegiatan pelayanan pemerintahan baik kepada publik maupun layanan administrasi pemerintahan sebagian besar masih bersifat manual	percepatan pembangunan dan pengembangan SPBE - Masih terdapat wilayah blank spot persebaran layanan jaringan internet	Pemerintahan Berbasis Elektronik - Adanya komitmen Gubernur NTT - Adanya RPJMD yang memuat SPBE - Adanya Pergub Nomor 39 Tahun 2018 Tentang Tata Kelola Pengembangan e-Government Lingkup Pemerintah Provinsi NTT - Adanya Renduk SPBE

2.3.4. Tantangan dan peluang untuk meningkatkan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur

Dalam upaya meningkatkan kinerja pelayanan Diskominfo, perlu mengetahui dinamika tantangan dan peluang yang ada guna mempertajam kebijakan pelayanan Diskominfo untuk mendukung pencapaian target dan sasaran RPJMD Provinsi NTT 2018 - 2024.

Tantangan :

- 1) Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan komunikasi dan informatika yang terus berkembang
- 2) Perubahan regulasi yang terus menerus dan dinamis
- 3) Adanya tuntutan ketepatan dan kecepatan waktu penyampaian laporan, informasi dan data
- 4) Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat
- 5) Penempatan ASN Teknis kurang sesuai dengan kebutuhan
- 6) Pembangunan dan pengembangan TIK pada Perangkat Daerah belum berbasis keamanan informasi
- 7) Persebaran infrastruktur TIK terbatas

Peluang

- 1) Tuntutan peningkatan pelayanan Dinas Kominfo termuat dalam RPJMD, Visi dan Misi Kepala Daerah Periode 2018 – 2024
- 2) Perkembangan Teknologi Informasi yang berkembang pesat
- 3) Tersedianya regulasi . dan kebijakan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi
- 4) Besarnya afirmasi terhadap implementasi reformasi birokrasi
- 5) Sistem informasi pemerintah daerah yang mendukung perencanaan dan pengelolaan anggaran yang terintegrasi
- 6) Adanya peluang kerja sama dan dukungan dengan mitra terkait terhadap pelaksanaan tugas
- 7) Hubungan relasi yang baik dengan Dinas/ *Stakeholder* terkait

2.3.5. Isu- isu penting sebagai rekomendasi dan catatan strategis dalam perumusan program dan kegiatan prioritas Tahun 2024**1. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)**

Layanan masyarakat yang termasuk urusan pemerintah Provinsi NTT akan dilayani berbasis elektronik. Layanan masyarakat yang semula secara manual secara bertahap akan dilayani secara elektronik. Implementasi e-Government perlu didorong terus agar semakin mengarah pada substansi yang semestinya khususnya mencakup infrastruktur, konten, aplikasi dan sumberdaya manusia.

2. Pembangunan Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi NTT

Untuk mendukung pemerintah daerah dalam melaksanakan fungsinya, maka penentuan arah dan sasaran pembangunan daerah harus dilandasi oleh data dan informasi yang akurat. Untuk

itu pengelolaan data dan informasi daerah harus difasilitasi secara terpadu dan terintegrasi dengan berbasiskan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan dikelola sesuai Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

3. Tuntutan Publik akan Keterbukaan Informasi dan Transparansi;
Pola pikir masyarakat yang semakin maju dan berkembang akan semakin menuntut berbagai informasi yang dibutuhkan. Masyarakat semakin kritis dan berani untuk menyampaikan pendapat, akan terus berupaya untuk mencari informasi yang relevan dengan situasi kondisi yang dihadapinya. Hal ini selaras dengan UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mewajibkan seluruh badan publik untuk mengumumkan informasi publik secara serta merta, setiap saat dan berkala kepada masyarakat.

4. Keamanan Informasi SPBE

Keamanan informasi menjadi isu strategis yang perlu segera direspon mengingat:

- Pembangunan dan pengembangan TIK pada Perangkat Daerah belum berbasis keamanan informasi.
- Kurangnya pemahaman, kesadaran dan tata kelola serta infrastruktur terkait persandian dan keamanan informasi;

Permenkominfo Nomor 4 tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi Pasal 7 mengatur :

- a) Penyelenggara Sistem Elektronik yang menyelenggarakan Sistem Elektronik strategis harus menerapkan standar SNI ISO/IEC 27001 dan ketentuan pengamanan yang ditetapkan oleh Instansi Pengawas dan Pengatur Sektornya.
- b) Penyelenggara Sistem Elektronik yang menyelenggarakan Sistem Elektronik tinggi harus menerapkan standar SNI ISO/IEC 27001.
- c) Penyelenggara Sistem Elektronik yang menyelenggarakan Sistem Elektronik rendah harus menerapkan pedoman Indeks Keamanan Informasi.

Berdasarkan peraturan ini maka sudah menjadi kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik strategis untuk mensertifikasian SNI ISO/IEC 27001 layanannya, dan bagi Penyelenggara Sistem Elektronik rendah harus menerapkan pedoman Indeks Keamanan Informasi.

5. Peningkatan Infrastruktur TIK dan Pengintegrasian Data Di Seluruh OPD

Untuk Perencanaan pembangunan dan pengembangan infrastruktur TIK di lingkup Pemerintah Provinsi NTT ke depan perlu memenuhi kebutuhan infrastruktur jaringan sesuai standar seperti Ruang TIK, Sistem Pendukung, Sistem M/E (Listrik dan UPS), Sistem komunikasi dan jaringan, Topologi jaringan, bandwidth & kapasitas jaringan

serta security jaringan. Prioritas untuk Tahun 2024 akan menyediakan Bandwith dan kapasitas jaringan bagi Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi NTT yang terintegrasi

2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah) merupakan dasar untuk penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur yang disusun setiap tahunnya, dengan tujuan untuk mendapat keselarasan program kegiatan yang terdapat dalam rancangan awal RKPD sehingga terwujud kesesuaian/keselarasan antara RKPD, Renja dan kebutuhan pagu anggaran yang mendukungnya.

Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024. Untuk mendapatkan keselarasan antara Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 maka penyusunan Rencana Kerja Dinas Kominfo Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2024 mengacu kepada Rancangan awal RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2018-2024, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2024 dan dokumen perencanaan lainnya.

2.4.1. Identifikasi Program/Kegiatan Yang Tercantum Rancangan Awal RKPD.

Hasil identifikasi dari Program/Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur semuanya telah terakomodir dalam rancangan awal RKPD dimana Dinas Komunikasi dan Informatika menangani 3 urusan yaitu :

2.16 Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika

2.16.01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

2.16.01.1.01. Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2.16.01.1.02. Administrasi Keuangan
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- 2.16.01.1.05. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- 2.16.01.1.06. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Penyediaan Bahan/Material
 - Fasilitas Kunjungan Tamu
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
- 2.16.01.1.07. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 2.16.01.1.08. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 2.16.01.1.09. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2.16.02. Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik

2.16.02.1.01 Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi

- Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
- Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah
- Monitoring Opini dan Aspirasi Publik
- Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik
- Pelayanan Informasi Publik
- Layanan Hubungan Media
- Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik
- Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan

2.16.03. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

2.16.03.1.01 Pengelolaan Nama Domain Yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat Dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi

- Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi
- Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah

2.16.03.1.02 Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi

- Penatalaksanaan dan Pengawasan nama domain dan sub domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi
- Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah
- Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah

2.20 Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

2.20.02. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

2.20.02.1.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral Di Lingkup Daerah Provinsi

- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral
- Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu statistik daerah yang terintegrasi
- Membangun Metadata Statistik Sektoral
- Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral

2.21 Urusan Pemerintahan Bidang Persandian

2.21.02. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

2.21.02.1.01 Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Daerah Provinsi

- Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi
- Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengeolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi
- Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi berbasis Elektronik dan Non Elektronik
- Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi

2.4.2. Perbandingan Rancangan Awal RKPD dengan Analisis Kebutuhan.

Dari hasil pencermatan internal terdapat adanya perbedaan antara anggaran yang diusulkan (ideal) dengan anggaran pada rancangan RKPD.

No	Program/Kegiatan	Rencana Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
		Lokasi	Indikaor Kinerja	Target Capaian	Pagu Indika tif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				9.689.000						
2.16.01.1.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Diskominfo Prov ntt			142.000.000		Diskomin fo Prov ntt			142.000.000	
2.16.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD <i>Koordinasi Penyusunan RKA-SKPD</i>	Diskominfo Prov ntt	Tersedianya RKA-SKPD	1 Dokumen	10.000.000,00		Diskomin fo Prov ntt	Tersedianya RKA-SKPD	1 Dokumen	10.000.000,00	
2.16.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan - RKA-SKPD <i>Koordinasi Perubahan RKA-SKPD</i>	Diskominfo Prov ntt	Tersediannya RKPA-SKPD	1 Dokumen	7.000.000		Diskomin fo Prov ntt	Tersediannya RKPA-SKPD	1 Dokumen	7.000.000	
2.16.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD <i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD</i>	Diskominfo Prov ntt	Tersusunnya Laporan Kinerja (LKIP), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggara n Pemerintah Daerah (LPPD), Tersedianya Kinerja Berkala	20 Lapora	30.000.000		Diskomin fo Prov ntt	Tersusunnya Laporan Kinerja (LKIP), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Tersedianya Kinerja Berkala	20 Laporan	30.000.000	

No	Program/Kegiatan	Rencana Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
2.16.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah <i>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	Diskominfo Prov ntt	- Terselenggaranya evaluasi terhadap kinerja Perangkat Daerah - Terselenggaranya Audit ISO 9001:2015 - Terselenggaranya Evaluasi RB SKPD	- 16 Laporan - 1 Sertifikat ISO - 80 Nilai RB	95.000.000		Diskominfo Prov ntt	- Terselenggaranya evaluasi terhadap kinerja Perangkat Daerah - Terselenggaranya Audit ISO 9001:2015 - Terselenggaranya Evaluasi RB SKPD	- 16 Laporan - 1 Sertifikat ISO - 80 Nilai RB	95.000.000	
2.16.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				8.287.461.682					8.287.461.682	
2.16.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN <i>Belanja Gaji dan Tunjangan ASN</i>	Diskominfo Prov ntt	Terbayarnya Gaji ASN	14 Bulan	8.176.461.682		Diskominfo Prov ntt	Terbayarnya Gaji ASN	14 Bulan	8.176.461.682	
2.16.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD <i>Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan dan Pengadaan Barang/Jasa</i>	Diskominfo Prov ntt	Terlaksananya penatausahaan / verifikasi pengelolaan keuangan Dinas Kominfo	36 Dokumen	110.000.000		Diskominfo Prov ntt	Terlaksananya penatausahaan / verifikasi pengelolaan keuangan Dinas Kominfo	36 Dokumen	110.000.000	
2.16.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD <i>Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>	Diskominfo Prov ntt	Tersedianya Laporan Keuangan Berkala dan Akhir Tahun	17 Laporan	1.000.000		Diskominfo Prov ntt	Tersedianya Laporan Keuangan Berkala dan Akhir Tahun	17 Laporan	1.000.000	
2.16.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				120.000.000					120.000.000	

No	Program/Kegiatan	Rencana Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
2.16.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai <i>Tim Penilai Angka Kredit Tenaga Fungsional dan Tim Website PPID Pembantu</i>	Diskominfo Prov ntt	<ul style="list-style-type: none"> - Terlaksananya evaluasi dan penilaian Angka Kredit tenaga fungsional Pranata Komputer dan Pranata Humas - Terciptanya aplikasi Penilaian Fungsional Prakom dan Pranata Humas - Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Kinerja 	<ul style="list-style-type: none"> - 20 ASN - 1 Aplikasi - 70 ASN 	100.000.000		Diskominfo Prov ntt	<ul style="list-style-type: none"> - Terlaksananya evaluasi dan penilaian Angka Kredit tenaga fungsional Pranata Komputer dan Pranata Humas - Terciptanya aplikasi Penilaian Fungsional Prakom dan Pranata Humas - Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Kinerja 	<ul style="list-style-type: none"> - 20 ASN - 1 Aplikasi - 70 ASN 	100.000.000	
2.16.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi <i>Pendidikan dan Pelatihan Formal ASN</i>	Diskominfo Prov ntt	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal ASN lingkup Diskominfo	70 ASN	20.000.000		Diskominfo Prov ntt	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal ASN lingkup Diskominfo	70 ASN	20.000.000	
2.16.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				206.000.000					206.000.000	
2.16.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor <i>Penyediaan Komponen Listrik</i>	Diskominfo Prov ntt	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan	12 Paket	15.000.000		Diskominfo Prov ntt	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan	12 Paket	15.000.000	
2.16.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan <i>Penyediaan Barang Cetak</i>	Diskominfo Prov ntt	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	12 Paket	35.000.000		Diskominfo Prov ntt	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	12 Paket	35.000.000	

No	Program/Kegiatan	Rencana Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
		Lokasi	Indikaor Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
2.16.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan <i>Penyediaan Bahan Bacaan</i>	Diskominfo Prov ntt	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Dokumen	10.00 0.000		Diskominfo Prov ntt	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Dokumen	10.000.000	
2.16.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material <i>Penyediaan Bahan Material</i>	Diskominfo Prov ntt	- Tersedianya Alat Tulis Kantor - Tersedianya Alat Tulis Kantor.	12 Paket	40.00 0.000		Diskominfo Prov ntt	- Tersedianya Alat Tulis Kantor - Tersedianya Alat Tulis Kantor.	12 Paket	40.000.000	
2.16.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu <i>Fasilitas Kunjungan Tamu</i>	Diskominfo Prov ntt	Tersedianya makanan dan minuman kantor	12 Laporan	16.00 0.000		Diskominfo Prov ntt	Tersedianya makanan dan minuman kantor	12 Laporan	16.000.000	
2.16.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD <i>Penyelenggaraan Rapat</i>	Diskominfo Prov ntt	Terlaksanya rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah maupun luar daerah.	12 Laporan	75.00 0.000		Diskominfo Prov ntt	Terlaksanya rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah maupun luar daerah.	12 Laporan	75.000.000	
2.16.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD <i>Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD</i>	Diskominfo Prov ntt	Terlaksannya Pengelolaan Website Dinas dan Website PPID Pembantu.	12 Ariket/Berita	15.00 0.000		Diskominfo Prov ntt	Terlaksannya Pengelolaan Website Dinas dan Website PPID Pembantu.	12 Ariket/Berita	15.000.000	
2.16.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				75.00 0.000					75.000.000	
2.16.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya <i>Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga</i>	Diskominfo Prov ntt	Tersedianya Peralatan Kantor, mebel, komputer, mainframe, studi es audio, video	10 Unit	75.00 0.000		Diskominfo Prov ntt	Tersedianya Peralatan Kantor, mebel, komputer, mainframe, studies audio, video	10 Unit	75.000.000	

No	Program/Kegiatan	Rencana Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
		Lokasi	Indikaor Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
2.16.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				679.773.920					679.773.920	
2.16.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat <i>Belanja Benda Pos dan Paket /Pengiriman</i>	Diskominfo Prov ntt	Tersedianya Fasilitas surat menyurat	12 Paket	5.000.000		Diskominfo Prov ntt	Tersedianya Fasilitas surat menyurat	12 Paket	5.000.000	
2.16.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik <i>Belanja Tagihan Telepon, Tagihan Air, Tagihan Listrik dan Sewa Hosting</i>	Diskominfo Prov ntt	- Tersedianya jasa sumber daya komunikasi, air dan listrik - Tersedianya Jasa Sewa Hosting ntt.prov	- 12 Paket - 1 Tahun	150.000.000		Diskominfo Prov ntt	- Tersedianya jasa sumber daya komunikasi, air dan listrik - Tersedianya Jasa Sewa Hosting ntt.prov	- 12 Paket - 1 Tahun	150.000.000	
2.16.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor <i>Belanja Jasa Tenaga Administrasi, Jasa Tenaga Kebersihan dan Jasa Tenaga Supir.</i>	Diskominfo Prov ntt	Tersedianya jasa tenaga administrasi, jasa tenaga kebersihan dan jasa tenaga supir	19 Orang/bulan	524.773.920		Diskominfo Prov ntt	Tersedianya jasa tenaga administrasi, jasa tenaga kebersihan dan jasa tenaga supir	19 Orang/bulan	524.773.920	
2.16.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				178.790.190					178.790.190	

No	Program/Kegiatan	Rencana Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
2.16.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan <i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan</i>	Diskominfo Prov ntt	- Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional. - Tersedianya fasilitas bahan bakar minyak kendaraan Tersedianya perizinan kendaraan dinas/operasional	- 5 Kendaraan Dinas - 5 Kendaraan Dinas 5 Kendaraan Dinas	100.000.00		Diskominfo Prov ntt	- Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional. - Tersedianya fasilitas bahan bakar minyak kendaraan Tersedianya perizinan kendaraan dinas/operasional	- 5 Kendaraan Dinas - 5 Kendaraan Dinas 5 Kendaraan Dinas	100.000.00	
2.16.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya <i>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	Diskominfo Prov ntt	Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor	12 Paket	40.000.000		Diskominfo Prov ntt	Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor	12 Paket	40.000.000	
2.16.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya <i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor</i>		Terpeliharanya gedung kantor	12 Paket	38.790.190			Terpeliharanya gedung kantor	12 Paket	38.790.190	
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK				1.482.914.700					1.700.000.000	
2.16.02.1.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi				1.482.914.700					1.700.000.000	

No	Program/Kegiatan	Rencana Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
2.16.02.1.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik <i>Rakor Bidang fominfo</i>	Kab. Belu	Rapat Koordinasi perumusan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika	✓ 1 kegiatan Rakor ✓ 1 Dok Rekomendasi kebijakan	50.000.000		Kab. Belu	Rapat Koordinasi perumusan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika	✓ 1 kegiatan Rakor 1 Dok Rekomendasi kebijakan	50.000.000	
2.16.02.1.01.02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik <i>Dialog Interaktif Radio dan Televisi di NTT</i>	Kota Kupang	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	5 Dokumen	70.000.000		Kota Kupang	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	5 Dokumen	100.000.000	
2.16.02.1.01.11	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi Daerah	Kota Kupang	Jumlah dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di daerah	1 dokumen	90.000.000		Kota Kupang	Jumlah dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di daerah	1 dokumen	100.000.000	

No	Program/Kegiatan	Rencana Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
2.16.02.1.01.04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik - Literasi Digital Pemanfaatan Media Sosial - Iklan Layanan Masyarakat	✓ Frekuensi kegiatan dan jumlah masyarakat yang diberi literasi digital pemanfaatan media sosial ✓ Jenis dan jumlah produksi iklan layanan masyarakat	✓ Frekuensi kegiatan dan jumlah masyarakat yang diberi literasi digital pemanfaatan media sosial ✓ Jenis dan jumlah produksi iklan layanan masyarakat	5 kali produksi berupa himbauan/ kebijakan pemerintah	30.000.000		✓ Frekuensi kegiatan dan jumlah masyarakat yang diberi literasi digital pemanfaatan media sosial Jenis dan jumlah produksi iklan layanan masyarakat	✓ Frekuensi kegiatan dan jumlah masyarakat yang diberi literasi digital pemanfaatan media sosial Jenis dan jumlah produksi iklan layanan masyarakat	5 kali produksi berupa himbauan/ kebijakan pemerintah	50.000.000	

No	Program/Kegiatan	Rencana Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
2.16.02.1.01.06	Pelayanan Informasi Publik <i>- Evaluasi Indeks Keterbukaan Informasi Publik,</i> <i>- Pengelola Website PPID Utama Provinsi NTT</i> <i>- Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik di Malaka</i> <i>- Pembinaan dan Konsolidasi Penyelenggaraan PPID Utama Provinsi NTT</i> <i>- Forum Komunikasi PPID</i> <i>- Kaleidoskop Jejak Karya Gubernur dan Wakil Gubernur NTT</i>	Kota Kupang	- Indeks Keterbukaan Informasi Publik, - Terbentuknya Pengelola Website PPID Utama Provinsi NTT - Terlaksananya Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik di Malaka - Terlaksananya Pembinaan dan Konsolidasi Penyelenggaraan PPID Utama Provinsi NTT - Terlaksananya Forum Komunikasi PPID - Terlaksananya Kaleidoskop Jejak Karya Gubernur dan Wakil Gubernur NTT	- NTT menuju informative - 1 Kegiatan - 1 Kegiatan - 1 Kegiatan - 1 Kegiatan - 1 Kegiatan - 1 Kegiatan	92.914.700		Kota Kupang	- Indeks Keterbukaan Informasi Publik, - Terbentuknya Pengelola Website PPID Utama Provinsi NTT - Terlaksananya Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik di Malaka - Terlaksananya Pembinaan dan Konsolidasi Penyelenggaraan PPID Utama Provinsi NTT - Terlaksananya Forum Komunikasi PPID - Terlaksananya Kaleidoskop Jejak Karya Gubernur dan Wakil Gubernur NTT	- NTT menuju informative - 1 Kegiatan - 1 Kegiatan - 1 Kegiatan - 1 Kegiatan - 1 Kegiatan	150.000.000	

No	Program/Kegiatan	Rencana Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
		Lokasi	Indikaor Kinerja	Target Capaian	Pagu Indika tif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
2.16.02.1.01.07	Layanan Hubungan Media <i>Jumpa Pers</i>	Kota Kupang	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Terlaksananya Dokumentasi Publikasi Live Streaming Penyelenggaraan Pemerintah Provinsi NTT ✓ Terlaksannya Media gathering di Wilayah Kota Kupang ✓ Terlaksannya Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 20 Kali ✓ 1 Kegiatan ✓ 1 Kabupatem 	75.000.000	APBD	Kota Kupang	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Terlaksananya Dokumentasi Publikasi Live Streaming Penyelenggaraa n Pemerintah Provinsi NTT ✓ Terlaksannya Media gathering di Wilayah Kota Kupang Terlaksannya Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 20 Kali ✓ 1 Kegiatan ✓ 1 Kabupatem 	100.000.000	
2.16.02.1.01.10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik <i>Bimtek Jurnalis</i>	Kota Kupang	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksannya Kegiatan Bimtek Konten Kreator di Kota Kupang • Tersedianya SDM Konten Kreator 	1 kali kegiatan, 50 orang	75.000.000		Kota Kupang	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksannya Kegiatan Bimtek Konten Kreator di Kota Kupang Tersedianya SDM Konten Kreator 	1 kali kegiatan, 50 orang	100.000.000	
2.16.02.1.01.12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas <i>Pembentukan dan Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat</i>	22 Kab / Kota	Terlaksannya Mitra dengan badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum	2 Lembaga	1.000.000.000		22 Kab / Kota	Terlaksannya Mitra dengan badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum	2 Lembaga	100.000.000	

No	Program/Kegiatan	Rencana Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA				1.648.079.860					15.750.000.000	
2.16.03.1.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi				352.579.860					3.150.000.000	
2.16.03.1.01.02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi - <i>Pengelolaan Website ntprov.go.id,</i> - <i>Pembuatan Website Dinas Kominfo</i> - <i>Pembuatan Webmail</i>		- Tersedianya Webservice Pada Website Perangkat daerah, - Tersedianya Webmail Dinas Kominfo - Tersedianya Website Dinas Kominfo - Terlaksananya Pengelolaan Website ntprov.go.id	- 39 Perangkat Daerah - 39 Perangkat Daerah - 1 Website - 1 Website	<i>150.000.000</i>			- Tersedianya Webservice Pada Website Perangkat daerah, - Tersedianya Webmail Dinas Kominfo - Tersedianya Website Dinas Kominfo - Terlaksananya Pengelolaan Website ntprov.go.id	- 39 Perangkat Daerah - 39 Perangkat Daerah - 1 Website - 1 Website	150.000.000	

No	Program/Kegiatan	Rencana Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
		Lokasi	Indikaor Kinerja	Target Capaian	Pagu Indika tif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
2.16.03.1.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah <i>- Pembangunan Jaringan LAN berbasis Fiber Optik,</i> <i>- Pengadaan peralatan dan perlengkapan ruang NOC dan control room</i>	Kota Kupang	- Jumlah SDM Berkualitas yang Menangani Jaringan - Tersedianya Dokumen rencana Pengembangan Integrasi Jaringan dan Sistem Penghubung TIK Lingkup Pemprov - Tersedianya Dokumen Terkait Standard dan Spesifikasi Perangkat Keras TIK di Lingkup Peprov - Tersedianya NOC dan Perngkat Kontrol Jaringan	- 2 ASN - 1 Dokumen - 1 Dokumen - 1 paket	202.579.860		Kota Kupang	- Jumlah SDM Berkualitas yang Menangani Jaringan - Tersedianya Dokumen rencana Pengembangan Integrasi Jaringan dan Sistem Penghubung TIK Lingkup Pemprov - Tersedianya Dokumen Terkait Standard dan Spesifikasi Perangkat Keras TIK di Lingkup Peprov - Tersedianya NOC dan Perngkat Kontrol Jaringan	- 2 ASN - 1 Dokumen - 1 Dokumen - 1 paket	3.000.000.000	
2.16.03.1.02.01	Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi			-	1.295.500.00					12.600.000.000	

No	Program/Kegiatan	Rencana Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
2.16.03.1.02.01	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi <i>- Evaluasi SPBE</i> <i>- Penyusunan Juknis Audit, Pelaksanaan Audit Infrastruktur di 38 OPD</i> <i>- Pengawasan dan pengendalian infrastruktur</i> <i>- Penyusunan tata layanan hosting/ collocation server</i> <i>- Konsolidasi dan koordinasi pelaksanaan pembangunan TIK</i>		- Indeks SPBE - Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Aplikasi E-Absensi - Terlaksananya Pengawasan dan pengendalian Aplikasi dan Tanda Tangan Elektronik - Tersedianya Sosialisasi Arsitektur SPBE - Terlaksananya tata Layan Hosting/Collocation Server	- Indeks SPBE 2,7 - 1 aplikasi - 2 Aplikasi - 1 Dokumen - 1 Dokumen	310.000.000			- Indeks SPBE - Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Aplikasi E-Absensi - Terlaksananya Pengawasan dan pengendalian Aplikasi dan Tanda Tangan Elektronik - Tersedianya Sosialisasi Arsitektur SPBE - Terlaksananya tata Layan Hosting/Collocation Server	- Indeks SPBE 2,7 - 1 aplikasi - 2 Aplikasi - 1 Dokumen - 1 Dokumen	5.000.000.000	
2.16.03.1.02.04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Kota Kupang	Tersedianya Layanan Virtual Meeting Lingkup Pemprow	39 Perangkat Daerah	50.000.000		Kota Kupang	Tersedianya Layanan Virtual Meeting Lingkup Pemprow	39 Perangkat Daerah	100.000.000	

2.16.03. 1.02.10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Kota Kupang	<ul style="list-style-type: none"> - Kelancaran layanan akses internet dalam penyelenggaraan pemerintahan - Terlaksannya Pra Audit Internal Infrastruktur TIK Lingkup Pemprov NTT - Tersedianya akses dedicated - Tersedianya Data Perencanaan dan usulan Pembangunan BTS dan Layanan Internet di Provinsi NTT - Tersedianya dokumen/panduan/juknis Audit Internal Infrastruktur TIK lingkup pemprov NTT - Tersedianya perangkat computer pc untuk layanan manajemen bandwidth 	<ul style="list-style-type: none"> - 12 Bulan - 1 Dokumen Pelaporan - 70 mbps/tahun - 1 Dokumen - 1 Dokumen - 1 Unit 	935.500.000		Kota Kupang	<ul style="list-style-type: none"> - Kelancaran layanan akses internet dalam penyelenggaraan pemerintahan - Terlaksannya Pra Audit Internal Infrastruktur TIK Lingkup Pemprov NTT - Tersedianya akses dedicated - Tersedianya Data Perencanaan dan usulan Pembangunan BTS dan Layanan Internet di Provinsi NTT - Tersedianya dokumen/panduan/juknis Audit Internal Infrastruktur TIK lingkup pemprov NTT - Tersedianya perangkat computer pc untuk layanan manajemen bandwidth 	<ul style="list-style-type: none"> - 12 Bulan - 1 Dokumen Pelaporan - 70 mbps/tahun - 1 Dokumen - 1 Dokumen - 1 Unit 	7.500.000.000	
---------------------	---	-------------	--	--	-------------	--	-------------	--	--	---------------	--

No	Program/Kegiatan	Rencana Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL				400.000.000					540.000.000	
2.20.02.1.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi				400.000.000					540.000.000	
2.20.02.1.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Kota Kupang	<ul style="list-style-type: none"> - Terbentuknya Forum Satu Data Indonesia - Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Forum Satu Data Indonesia - Terlaksananya Pengelolaan Satu Data Indonesia dan Data Statistik Sektoral 	<ul style="list-style-type: none"> - 1 Kegiatan - 1 Kegiatan - 2 Kegiatan/Bulan / Tahun 	200.000.000		Kota Kupang	<ul style="list-style-type: none"> - Terbentuknya Forum Satu Data Indonesia - Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Forum Satu Data Indonesia - Terlaksananya Pengelolaan Satu Data Indonesia dan Data Statistik Sektoral 	<ul style="list-style-type: none"> - 1 Kegiatan - 1 Kegiatan - 2 Kegiatan/Bulan/ Tahun 	250.000.000	
2.20.02.1.01.03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Kota Kupang	Terlaksananya Pengembangan Aplikasi Satu Data Statistik Sektoral	1 Aplikasi	50.000.000		Kota Kupang	Terlaksananya Pengembangan Aplikasi Satu Data Statistik Sektoral	1 Aplikasi	70.000.000	
2.20.02.1.01.04	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Kota Kupang	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Lembaga/Perangkat Daerah/Pemkab/ Pemkot	10 Unit Kerja	50.000.000		Kota Kupang	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Lembaga/Perangkat Daerah/Pemkab/ Pemkot	10 Unit Kerja	70.000.000	

No	Program/Kegiatan	Rencana Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
2.20.02. 1.01.02	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintahan Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang terintegrasi	Kota kupang	Terlaksananya Peningkatan SDM Pengelola Satu Data Indonesia Lingkup Pemprov	39 Perangkat Daerah	100.000.000		Kota kupang	Terlaksananya Peningkatan SDM Pengelola Satu Data Indonesia Lingkup Pemprov	39 Perangkat Daerah	150.000.000	
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI				500.000.000					670.000.000	
2.21.02. 1.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi				500.000.000					670.000.000	
2.21.02. 1.01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Kota Kupang	Tersusunnya Peraturan Gubernur Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Informasi Berklasifikasi Milik Pemprov. NTT	1 Peraturan Gubernur	15.000.000		Kota Kupang	Tersusunnya Peraturan Gubernur Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Informasi Berklasifikasi Milik Pemprov. NTT	1 Peraturan Gubernur	35.000.000	

No	Program/Kegiatan	Rencana Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
2.21.02.1.02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Kemanan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Kota Kupang	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah kab/kota - Tercapainya Audit Internal Penyelenggaraan Persandian - Tersedianya Sumber Daya Penanganan Insiden Siber/CSIRT 	<ul style="list-style-type: none"> - 6 Kota/Kabupaten - 1 Kali Audit - 1 Workshop 	120.000.000		Kota Kupang	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah kab/kota - Tercapainya Audit Internal Penyelenggaraan Persandian - Tersedianya Sumber Daya Penanganan Insiden Siber/CSIRT 	<ul style="list-style-type: none"> - 6 Kota/Kabupaten - 1 Kali Audit - 1 Workshop 	250.000.000	
2.21.02.1.01.03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Kota Kupang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Uji Aplikasi/ITSA, hardening dan CSIRT	38 PD	80.000.000		Kota Kupang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Uji Aplikasi/ITSA, hardening dan CSIRT	38 PD	100.000.000	

No	Program/Kegiatan	Rencana Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
		Lokasi	Indikaor Kinerja	Target Capaian	Pagu Indika tif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
2.21.02.1.01.04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Kota Kupang	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi Tanda Tangan Elektronik dan Email Sanapati - Tersedianya Alat Pendukung Utama Persandian dan Keamanan Informasi 	<ul style="list-style-type: none"> - 38 Perangkat at Daerah - 1 Paket 	285.000.000		Kota Kupang	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi Tanda Tangan Elektronik dan Email Sanapati - Tersedianya Alat Pendukung Utama Persandian dan Keamanan Informasi 	<ul style="list-style-type: none"> - 38 Perangkat Daerah - 1 Paket 	285.000.000	

Perbedaan tersebut akan berdampak terhadap pencapaian target kinerja yang telah diisyaratkan di dalam Rencana Strategis (Renstra Dinas) Komunikasi dan Informatika. Alokasi dana yang sangat minim dan inkonsistensi anggaran dalam pembiayaan program dan kegiatan untuk mendukung pencapaian target – target dalam RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur 2018-2024 dan Rencana Strategis Dinas Kominfo berdampak terhadap adanya Program/Kegiatan yang tidak diusulkan atau ada kemungkinan Program/Kegiatan yang tidak memenuhi target sasaran kinerja yang direncanakan.

2.4.3. Catatan Penting.

Berdasarkan pengalaman pelaksanaan program dan kegiatan tahun-tahun yang lalu ada beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian pada pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024 sebagai berikut :

1. Bidang cukup mengalami kesulitan dalam menyesuaikan Program/Kegiatan berdasarkan pagu indikatif yang ada karena sesungguhnya setiap bidang telah menyusun Rencana Program/Kegiatan tahun 2024 untuk mendukung terealisasinya Rencana Kerja Tahunan dan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika namun secara pagu indikatif tidak terakomodir dalam pagu indikatif yang disediakan.
2. Melakukan proses perencanaan dengan lebih seksama, antara lain dengan menggelar review triwulanan.
3. Meningkatkan koordinasi dengan semua pegawai di setiap Bidang di Dinas Komunikasi dan Informatika terutama untuk meningkatkan kualitas sarana prasarana pendukung kerja, yaitu dengan pemeliharaan baik komputer, kendaraan, sarana prasarana kantor maupun gedung, karena kerusakan yang tidak bisa diprediksi sehingga kebutuhan perbaikan sarana dan prasarana sulit dianggarkan dengan tepat.

2. Penyediaan Internet Gratis di Tempat – Tempat Umum / Internet Keliling

Dengan adanya pandemi Covid-19 kebutuhan internet bagi masyarakat umum terlebih pelajar/mahasiswa menjadi salah satu kebutuhan utama. Selain penyediaan internet gratis di tempat – tempat umum, penyediaan internet keliling dapat menjadi alternatif pilihan lainnya guna mempermudah akses informasi dan teknologi bagi masyarakat.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.1.1. Telaahan terhadap Renstra Kementerian Kominfo

Dalam rangka mendukung Visi dan Misi Presiden Republik Indonesia, Kemenkominfo memetakan Arah Pembangunan Nasional ke dalam (3) tiga tujuan utama Kemenkominfo sebagai fokus pada pembangunan bidang komunikasi dan informatika sebagai berikut:

1. Meningkatkan penyediaan dan pemerataan infrastruktur TIK berkualitas di seluruh wilayah Indonesia;
2. Mendorong percepatan transformasi digital di 3 aspek, bisnis, masyarakat dan pemerintahan, yang ditunjang oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi digital; dan
3. Memperkuat transparansi informasi publik dan pengelolaan komunikasi publik.

Dalam mewujudkan tujuan di atas, Kemenkominfo menetapkan sasaran strategis pembangunan bidang komunikasi dan informatika untuk tahun 2020 – 2024 sebagai berikut:

1. Meningkatnya cakupan jaringan pita lebar yang cepat dan terjangkau;
2. Meningkatnya cakupan wilayah yang terlayani penyiaran digital;
3. Meningkatnya konektivitas layanan pos;
4. Terwujudnya konektivitas *Next Generation Broadband* Nasional;
5. Meningkatnya pemanfaatan spektrum frekuensi radio dan kualitas pengelolaan layanan publik bidang pos, telekomunikasi dan informatika;
6. Meningkatnya pemanfaatan TIK di sektor ekoomi dan bisnis;
7. Terwujudnya masyarakat yang cerdas digital;
8. Dukungan implementasi digitalisasi pemerintah;
9. Meningkatnya kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik; dan
10. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

Sebagai leading sektor di bidang komunikasi dan informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam Renstra tahun 2019 – 2024 akan berfokus untuk mendukung mewujudkan Transformasi Digital Nasional

Direalisasikan dengan mempercepat agenda transformasi digital nasional melalui 5 (lima) langkah yaitu : mempercepat pembangunan infrastruktur digital dan penyediaan layanan internet, mempersiapkan *roadmap* transformasi digital di sector-sektor strategis, mempercepat integrasi pusat data nasional, mengembangkan sumber daya manusia dan talenta digital, serta menyiapkan berbagai regulasi dan skema pembiayaan untuk mendukung ekosistem digital. Lima langkah percepatan transformasi digital yang direncanakan menjadi fondasi bagi pengembangan *roadmap* Indonesia Digital.

Untuk mewujudkan transformasi digital tersebut, Kementerian Komunikasi dan Informatika menetapkan kebijakan dan strategi sebagai berikut :

No	Arah Kebijakan	Strategi
1	Menuntaskan penyediaan internet cepat dan berkualitas di desa yang belum terlayani termasuk lokasi layanan publik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mempercepat penyelesaian penyediaan internet cepat dan berkualitas di daerah yang secara ekonomi kurang layak bagi operator, termasuk lokasi layanan publik; 2. Mempercepat digitalisasi penyiaran (<i>analog switch off</i>), untuk meraih <i>digital dividend</i>; dan 3. <i>Farming</i> dan <i>refarming</i> frekuensi untuk layanan internet cepat dan berkualitas.
2	Mendorong penerapan teknologi berorientasi ke depan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menata alokasi frekuensi untuk memenuhi kebutuhan implementasi <i>next broadband</i> (5G); 2. Mengembangkan dan mengimplementasikan teknologi 5G nasional; dan 3. Penyediaan teknologi pengendalian konten di internet untuk internet bersih dan aman.
3	Mengembangkan SDM talenta digital dan ekosistem ekonomi digital	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengakselerasi kompetensi SDM talenta digital dan meningkatkan literasi digital masyarakat; dan 2. Mempercepat transformasi digital ada sektor-sektor ekonomi dan bisnis.
4	Integrasi Pusat Data Nasional dan transformasi digital pemerintahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mempercepat pembangunan dan pemanfaatan Pusat Data Nasional menuju Satu Data Indonesia; dan 2. Mendukung percepatan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

No	Arah Kebijakan	Strategi
5	Mempercepat penyelesaian legislasi primer	Mendorong penyelesaian kebijakan dan regulasi terkait TIK baik Undang-Undang, Perpres, ataupun Peraturan Menteri, meningkatkan koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait.
6	Melakukan orkestrasi komunikasi publik melibatkan perangkat pemerintah pusat dan daerah	1. Membangun pengelolaan komunikasi public yang efektif dan terorganisir; dan 2. Membangun tim yang solid dan responsive dalam mengkonter hoaks dan diseminasi kebijakan pemerintah.
7	Meningkatkan kualitas layanan manajemen internal	Mendorong inovasi dalam manajemen internal antara lain penerapan <i>smart services</i> , dan inovasi perencanaan penganggaran.

Indonesia Digital menetapkan enam arahan strategis untuk mewujudkan visinya. Enam arahan tersebut bertujuan untuk mengarahkan Indonesia menuju Ekonomi berbasis Inovasi dengan kapabilitas teknologi berkelas dunia, Sumber Daya Manusia (SDM) yang terampil, dan masyarakat yang berbudaya digital serta setiap menghadapi masa depan. Enam Arahan Strategis dimaksud adalah :

1. Membangun infrastruktur dan konektivitas yang aman dan andal dengan layanan berkualitas tinggi;
2. Mengubah Indonesia dari konsumen menjadi produsen teknologi melalui investasi pada berbagai *platform* yang memiliki nilai kepentingan strategis nasional, diantaranya pusat data, infrastruktur *cloud*, dan identitas digital nasional;
3. Meningkatkan kapabilitas digital pada sector prioritas untuk meningkatkan daya saing geostrategic dan mendorong pertumbuhan yang inklusif;
4. Membangun lembaga pemerintahan digital yang terbuka dan terintegrasi untuk meningkatkan pelayanan publik;
5. Membangun budaya digital dan memanfaatkan bonus demografi serta memberdayakan rakyat Indonesia dalam mengembangkan dunia digital; dan
6. Harmonisasi regulasi dan meningkatkan pendanaan untuk memajukan inovasi.

Untuk mewujudkan transformasi digital nasional ini, dibutuhkan peran serta seluruh lapisan masyarakat, kementerian/lembaga terkait dan pemerintah pusat secara keseluruhan untuk mendukung mewujudkan program-program digitalisasi.

Program Pemerintah Daerah dalam mendukung Komunikasi dan Informatika di Nusa Tenggara Timur melalui tiga (3) misi RPJMD yakni:

1. Peningkatan ketersediaan dan kualitas Infrastruktur di NTT (Misi ke tiga);
2. Peningkatan kualitas sebagai manusia (Misi ke empat);
3. Pembenahan system hukum dan reformasi birokrasi serta mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan dan peningkatan kualitas pelayanan publik (Misi ke lima);

Dengan mengacu RPJMD maka dalam rangka pengembangan dan pelaksanaan e-Government, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur bertanggung jawab mempersiapkan infrastruktur jaringan portal di instansi meliputi; Jaringan Komputer dan Jaringan Telekomunikasi yang menjamin Konektivitas yang aman, handal, yang dapat di akses oleh masyarakat dan dapat digunakan sebagai media pertukaran informasi antara lembaga pemerintah, baik pusat maupun daerah.

Peran ini telah dikuatkan dengan diterbitkannya Peraturan Gubernur NTT Nomor 39 Tahun 2018 Tentang Tata Kelola Pengembangan e-Government di lingkungan Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut; untuk mengetahui kondisi objektif pelaksanaan e-government pada Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi NTT dalam rangka peletakan kebijakan pembangunan dan pengembangan e-Government.

3.1.2. Telaahan kebijakan Sandi Negara dan Keamanan Informasi sesuai Renstra BSSN

Arah kebijakan dan strategi nasional dalam menjaga stabilitas keamanan nasional di ruang siber adalah penguatan keamanan dan ketahanan siber yang diwujudkan dengan strategi berikut :

1. penguatan pengamanan infrastruktur siber.
2. pembangunan dan penguatan *computer emergency response team*.
3. pencegahan kejahatan siber dan peningkatan kerjasama internasional bidang siber.
4. penguatan kapasitas sumber daya manusia keamanan siber.
5. penyelesaian kejahatan siber *clearance rate* tindak pidana siber.

Isu Strategis di bidang keamanan siber sebagai berikut:

1. fenomena digitalisasi pada sektor jasa dan keuangan serta meningkatnya pengguna internet.
2. serangan siber terbanyak sepanjang tahun 2019 berupa percobaan pembocoran data yang disusul dengan serangan trojan.
3. sistem monitoring keamanan siber mata garuda belum mampu mencakup seluruh titik rentan di Indonesia.
4. Indonesia belum memiliki pusat informasi terpadu yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai sumber informasi dan aduan keamanan siber.
5. belum ada mekanisme integrasi dan berbagi data informasi serangan siber antar pemangku kepentingan terkait

Dalam upaya mewujudkan keamanan siber nasional, keterlibatan daerah perlu didorong. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menjadikan persandian sebagai urusan pemerintahan konkuren yang bertujuan menyelenggarakan pengamanan informasi dan mewujudkan tata kelola secara terpadu dalam proses manajemen SPBE yang efektif, efisien, berkesinambungan, dan berkualitas. BSSN telah menyusun peraturan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang persandian di daerah melalui Peraturan BSSN Nomor 10 Tahun 2019. Peraturan dimaksud memuat norma, standar, prosedur, dan kriteria pelaksanaan urusan persandian.

Berdasarkan Peraturan BSSN Nomor 10 Tahun 2019, penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi dilaksanakan melalui 4 (empat) aspek yaitu :

- penetapan kebijakan tata kelola keamanan informasi.
- pengelolaan sumber data keamanan informasi.
- pengamanan sistem elektronik dan pengamanan informasi non elektronik.
- penyediaan layanan keamanan informasi.

3.1.3. Telaahan kebijakan nasional tentang data statistik sektoral melalui Renstra BPS

Sejalan dengan arahan kebijakan nasional dalam RPJMN Nasional 2020 – 2024, kebijakan pembangunan statistik tahun adalah penyediaan data dan informasi statistik yang berkualitas yang mencakup:

- 1) Peningkatan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi kegiatan statistik yang diselenggarakan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan swasta; Arah kebijakan yang dapat mendukung pencapaian tersebut yaitu terwujudnya System

Statistik Nasional (SSN) melalui Strategi Nasional Pembangunan Statistik Indonesia (SNPSI). Strategi yang dilakukan dengan meningkatkan harmonisasi kegiatan survei dan mengurangi tumpang tindih kegiatan survei.

- 2) Peningkatan hubungan dengan responden dan pengguna data; Arah kebijakan yang dilakukan antara lain:
 - Pengembangan Infrastruktur Statistik Nasional untuk Mendukung SSN;
 - Penguatan Implementasi Sistem Statistik Nasional dengan Pemanfaatan Infrastruktur Statistik Nasional; dan
 - Pembinaan K/L/D/I dalam rangka penyediaan statistik sektoral.
- 3) Peningkatan jumlah dan kompetensi SDM; Arah kebijakan yang dilakukan antara lain:
 - Meningkatkan kapasitas SDM BPS dengan menguatkan peran Pusdiklat;
 - Penguatan Kompetensi Pegawai BPS;
 - Membentuk organisasi yang lincah dan efisien.
- 4) Peningkatan sarana dan prasarana, termasuk yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan statistik; Arah kebijakan yang dilakukan antara lain:
 - Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan prima dan
 - Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan kinerja pegawai.
- 5) Peningkatan penggunaan standar dan metodologi statistik internasional di Indonesia; Arah kebijakan yang akan dilakukan yaitu memastikan penggunaan standar-standar dan metodologi internasional di Indonesia.
- 6) Peningkatan ketersediaan statistik dengan menerapkan standar penjaminan kualitas Arah kebijakan yang akan dilakukan yaitu dengan melaksanakan penjaminan kualitas pada kegiatan statistik dasar dan sektoral. Adapun penjaminan kualitas BPS mengacu pada rekomendasi UNSD (United Nation Statistics Devision) yang menurunkan 19 prinsip kualitas (principle quality) berdasarkan 10 UN Fundamental Principle of Official Statistics. Strategi yang dilakukan dengan Menyusun quality gates dan melaksanakan penjaminan kualitas pada setiap proses bisnis statistik dan Melakukan pengukuran kualitas dan deklarasi kualitas pada output yang dihasilkan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Pernyataan visi dan misi dicapai melalui pencapaian tujuan. Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi organisasi. Tujuan yang merupakan penjabaran atau

implementasi dari pernyataan misi, adalah hasil akhir yang akan dicapai pada jangka waktu tertentu. Penetapan tujuan harus dapat menggambarkan isu-isu strategis yang ingin dicapai oleh semua unit-unit kerja dalam suatu organisasi. Penetapan tujuan tidaklah mutlak harus terukur atau kuantitatif, namun setidaknya dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang akan dicapai dimasa mendatang. Penjabaran dari tujuan secara lebih spesifik dan terukur dirumuskan ke dalam sasaran. Sasaran merupakan bagian integral dari proses perencanaan strategis organisasi. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi. Oleh karena itu sasaran harus lebih fokus, bersifat spesifik, terinci dan dapat diukur.

3.2.1 Tujuan Renja Perangkat Daerah

1. Mewujudkan kebijaksanaan program pengembangan e-Government (SPBE) di lingkup pemerintah Provinsi NTT yang lebih terarah, terukur, berkesinambungan dan selaras dengan rencana strategis Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Termasuk dalam rangka menjalankan Peraturan Presiden Republik Indonesia No 95 tahun 2018, tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
2. Membangun system informasi dan komunikasi di lingkungan Pemerintah Provinsi NTT yang komprehensif dan terintegrasi untuk meningkatkan kualitas layanan publik, mendukung terbentuknya sistem manajemen dan proses kerja penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dengan tersedianya system monitoring dan evaluasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK).

3.2.2 Sasaran Renja Perangkat Daerah

1. Meningkatkan layanan SPBE yang terpadu dan berorientasi kepada pengguna
2. Tersedianya infrastruktur SPBE yang terintegrasi
3. Tersedianya Kapasitas SDM SPBE
4. Terwujudnya tata kelola keamanan informasi yang komprehensif dan implementasi
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan informasi dan komunikasi publik
6. Terselenggaranya pengelolaan data dan informasi berbasis web
7. Meningkatnya penyebaran informasi dan keterbukaan informasi publik
8. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat melalui jaringan komunikasi dan informatika
9. Tercapainya peningkatan kualitas sumberdaya aparatur yang professional berbasis TIK

*Tabel 3. 1 Prioritas dan Sasaran Reformasi dan Birokrasi
Dinas Komunikasi dan Informatika*

No	Prioritas	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD (outcome)
1	Reformasi Birokrasi	1.Mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik	1. Mewujudkan pemerintahan yang berkualitas	1. Peningkatan layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).	Tersedianya SDM bidang TIK (Web programing,database programing,sistem analis, android, desain grafis video editing dan maintenance software,hardware, pengelolaan jaringan dan keamanan data dan informasi
		2. Pembaharuan system penyelenggaraan pemerintahan indikator	2. Terwujudnya birokrasi yang professional, terintegrasi dan berkinerja tinggi	2. Terselenggaranya pengelolaan data dan informasi berbasis web	Jumlah sub domain ntprov.go.id
				3. Terwujudnya tata kelola keamanan informasi	Tersedianya Infrastruktur pengamanan informasi

*Tabel 3. 2 Tujuan Perangkat Daerah
Dinas Komunikasi dan Informatika*

No	Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Target Kinerja Tujuan PD Tahun 2024
1	Meningkatkan manajemen pemerintahan yang transparan,objektif, akun tabel dan efisien berbasis TIK untuk memperlancar transaksi layanan publik dan layanan pemerintahan	Aplikasi yang dibangun dan dikembangkan secara terintegrasi	80%
2	Mengupayakan keterbukaan informasi publik yang berbasis elektronik	Peningkatan Kualitas layanan keterbukaan informasi publik yang berbasis elektronik	100%
3	Keamanan Informasi Publik	Terwujudnya tata kelola keamanan informasi yang komperensif	90%
4	Peningkatan Manajemen pemerintahan yang transparan, objektif, akuntabel dan efisien berbasis TIK	Peningkatan Kualitas keterbukaan informasi publik	100%

*Tabel 3. 3 Sasaran Daerah
Dinas Komunikasi dan Informatika*

No	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran PD	Target Kinerja Sasaran PD Tahun 2024
1	Meningkatnya Layanan SPBE yang terintegrasi	Nilai indeks SPBE	2,7

No	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran PD	Target Kinerja Sasaran PD Tahun 2024
2	Tersedianya Data Statistik Sektoral dalam mendukung pembangunan infrastuktur	Cakupan Pemenuhan kebutuhan data statastik	100%
3	Terwujudnya Tata Kelola Keamanan Informasi	Meningkatnya Kapasitas Operatur Pemerintah Daerah Bidang Keamanan Informasi	90%
4	Meningkatnya Kualitas layanan keterbukaan informasi publik yang berbasis elektronik	Presentase peningkatan skor keterbukaan informasi publik	85%

*Tabel 3. 4 Indikator Kinerja Utama
Dinas Komunikasi dan Informatika*

No	IKU	Indikator Kinerja IKU	Target Kinerja IKU
1	SPBE	Tersedianya Layanan Sistem Pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) Lingkup Provinsi Nusa Tenggara Timur	2,7 Indeks
2	Keterbukaan Informasi Publik	Tingkat Keterbukaan Informasi Publik	100 (Informative)
3	Keamanan Informasi	Tingkat Pengamanan Informasi Daerah	5 (Baik)
4	Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi NTT	Presentasi Pemanfaatan Data Sektoral	100%
5	Jaringan Internet	Presentasi cakupan Internet di Perangkat Daerah	100%

BAB IV

RENCANA KERJA PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perencanaan adalah salah satu fungsi terpenting dalam mendukung kinerja Perangkat Daerah karena Rencana Kerja yang telah disusun dan disetujui diharapkan dapat digunakan oleh Perangkat Daerah sebagai pedoman untuk melaksanakan kegiatan secara terencana. Perencanaan dan penganggaran merupakan proses yang terintegrasi karena terkait dengan proses penentuan alokasi dana untuk tiap-tiap program dan kegiatan yang dilakukan dalam suatu Perangkat Daerah. Rencana Kerja berperan sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dalam membangun daerah sebagai turunan dari Rencana Strategis dalam pembangunan daerah.

Proses penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur diawali dengan setiap Seksi menyusun rancangan Rencana Kerja untuk Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing berdasarkan pagu indikatif yang telah ditetapkan. Hasil rancangan Rencana Kerja dari tiap-tiap Seksi kemudian disusun menjadi Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2024.

Disusunnya Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur dimaksudkan sebagai pedoman untuk melaksanakan tugas pokok fungsi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk satu tahun mendatang. Rencana Kerja juga digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA), Perjanjian Kinerja, dan Rencana Kerja Tahun 2024 untuk Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Tabel 4.1. Sasaran dan Program/Kegiatan

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur

No	Sasaran PD	Program/Kegiatan
1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan keterbukaan informasi public yang berbasis elektronik	Program : Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
		Kegiatan : Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi
2	Meningkatnya Layanan SPBE yang terintegrasi dan berorientasi kepada pengguna (layanan aplikasi)	Program : Pengelolaan Aplikasi Informatika Kegiatan : Pengelolaan Nama domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub

		Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi
3	Terimplementasinya e-government untuk meningkatkan pelayanan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat	Program : Pengelolaan Aplikasi Informatika Kegiatan : Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah daerah provinsi
4	Terwujudnya tata kelola keamanan informasi yang dalam mendukung penyelenggaraan SPBE	Program : Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Kegiatan : Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi
5	Terwujudnya konektivitas antar wilayah di dalam daerah dan keluar daerah	Program : Penyelenggaraan Statistik Sektor Kegiatan : Penyelenggaraan Statistik Sektor di Lingkup Provinsi.

4.1. Faktor – faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

- 1) Program/Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika telah mengacu pada program dan kebijakan nasional.
- 2) Program/Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika telah mengacu pada RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur pada misi ke III yaitu *Meningkatkan Ketersediaan Dan Kualitas Infrastruktur Untuk Mempercepat Pembangunan dan Misi ke V yaitu Mewujudkan Reformasi Birokrasi Pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.*
- 3) Program/Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika telah mengacu pada Rencana Strategis Dinas Komunikasi Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- 4) Program/Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika telah mengacu pada Perjanjian Kinerja dan Rencana Kerja Tahunan Dinas Komunikasi Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- 5) Pagu Anggaran sementara menyesuaikan dengan draft pagu anggaran indikatif yang telah ditentukan.

4.2 Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024

Untuk mencapai sasaran jangka menengah seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka disusunlah Program/Kegiatan sebagai berikut:

Tabel 4.2
Rekapitulasi Program dan Kegiatan Berdasarkan Prioritas Pembangunan Tahun 2024
Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Prioritas Pembangunan	Nama Program/Kegiatan	Pagu Indikatif (RP)	Ket
1	Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk peningkatan kinerja Birokrasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	9.689.025.792	
		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	142.000.000	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.287.461.682	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	120.000.000	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	206.000.000	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	75.000.000	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	679.773.920	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	178.790.190	
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	1.482.914.700	
		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	1.482.914.700	
		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	1.648.099.860	
		Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	352.579.860	
		Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	1.295.500.000	

No	Prioritas Pembangunan	Nama Program/Kegiatan	Pagu Indikatif (RP)	Ket
		PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	400.000.000	
		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	400.000.000	
		PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	500.000.000	
		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	500.000.000	

Tabel 4.3
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2024
Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Program/Kegiatan	Indikaor Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Awal 2024				Catatan Khusus	Perkiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan dana/ Pagu Indikatif	Sumbe r Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan data/ Pagu Indikatif
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				9.689.000	APBD			
2.16.01.1.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Diskominfo Prov ntt		142.000.000	APBD			156.200.000
2.16.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD <i>Koordinasi Penyusunan RKA-SKPD</i>	Tersedianya RKA-SKPD	Diskominfo Prov ntt	1 Dokumen	<i>10.000.000,00</i>	APBD		1 Dokumen	<i>11.000.000,00</i>
2.16.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan - RKA-SKPD <i>Koordinasi Perubahan RKA-SKPD</i>	Tersediannya RKPA-SKPD	Diskominfo Prov ntt	1 Dokumen	<i>7.000.000</i>	APBD		1 Dokumen	<i>7.700.000</i>
2.16.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD <i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD</i>	Tersusunnya Laporan Kinerja (LKIP), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Tersedianya Kinerja Berkala	Diskominfo Prov ntt	20 Laporam	<i>30.000.000</i>	APBD		20 Laporam	<i>33.000.000</i>

			Rencana Awal 2024					Perkiraan Maju Tahun 2024	
No	Program/Kegiatan	Indikaor Kinerja Program /Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan dana/ Pagu Indikatif	Sumbe r Dana	Catatan Khusus	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan data/ Pagu Indikatif
2.16.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah <i>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Terselenggaranya evaluasi terhadap kinerja Perangkat Daerah - Terselenggaranya Audit ISO 9001:2015 - Terselenggaranya Evaluasi RB SKPD 	Diskominfo Prov ntt	<ul style="list-style-type: none"> - 16 Laporan - 1 Sertifikat ISO - 80 Nilai RB 	95.000.000	APBD		<ul style="list-style-type: none"> - 16 Laporan - 1 Sertifikat ISO - 80 Nilai RB 	104.500.000
2.16.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				8.287.461.682	APBD			9.116.207.000
2.16.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN <i>Belanja Gaji dan Tunjangan ASN</i>	Terbayarnya Gaji ASN	Diskominfo Prov ntt	14 Bulan	8.176.461.682	APBD		14 Bulan	8.994.107.100
2.16.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD <i>Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan dan Pengadaan Barang/Jasa</i>	Terlaksananya penatausahaan / verifikasi pengelolaan keuangan Dinas Kominfo	Diskominfo Prov ntt	36 Dokumen	110.000.000	APBD		36 Dokumen	121.000.000
2.16.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD <i>Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>	Tersedianya Laporan Keuangan Berkala dan Akhir Tahun	Diskominfo Prov ntt	17 Laporan	1.000.000	APBD		17 Laporan	1.100.000
2.16.01.1.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				120.000.000	APBD			132.000.000

			Rencana Awal 2024					Perkiraan Maju Tahun 2024	
No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Khusus	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan data/ Pagu Indikatif
2.16.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai <i>Tim Penilai Angka Kredit Tenaga Fungsional dan Tim Website PPID Pembantu</i>	- Terlaksananya evaluasi dan penilaian Angka Kredit tenaga fungsional Pranata Komputer dan Pranata Humas - Terciptanya aplikasi Penilaian Fungsional Prakom dan Pranata Humas - Jumlah ASN yang berkinerja	Diskominfo Prov ntt	- 20 ASN - 1 Aplikasi - 70 ASN	100.000.000	APBD		- 20 ASN - 1 Aplikasi 70 ASN	110.000.000
2.16.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi <i>Pendidikan dan Pelatihan Formal ASN</i>	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal ASN lingkup Diskominfo	Diskominfo Prov ntt	70 ASN	20.000.000	APBD		70 ASN	22.000.000
2.16.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				206.000.000	APBD			226.600.000
2.16.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor <i>Penyediaan Komponen Listrik</i>	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan	Diskominfo Prov ntt	12 Paket	15.000.000	APBD		12 Paket	16.500.000
2.16.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan <i>Penyediaan Barang Cetak</i>	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	Diskominfo Prov ntt	12 Paket	35.000.000	APBD		12 Paket	38.500.000
2.16.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan <i>Penyediaan Bahan Bacaan</i>	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Diskominfo Prov ntt	12 Dokumen	10.000.000	APBD		12 Dokumen	11.000.000
2.16.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material <i>Penyediaan Bahan Material</i>	- Tersedianya Alat Tulis Kantor - Tersedianya Alat Tulis Kantor.	Diskominfo Prov ntt	12 Paket	40.000.000	APBD		12 Paket	44.000.000
2.16.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu <i>Fasilitas Kunjungan Tamu</i>	Tersedianya makanan dan minuman kantor	Diskominfo Prov ntt	12 Laporan	16.000.000	APBD		12 Laporan	17.600.000

No	Program/Kegiatan	Indikaor Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Awal 2024				Catatan Khusus	Perkiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan dana/ Pagu Indikatif	Sumbe r Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan data/ Pagu Indikatif
2.16.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD <i>Penyelenggaraan Rapat</i>	Terlaksanya rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah maupun luar daerah.	Diskominfo Prov ntt	12 Laporan	75.000.000	APBD		12 Laporan	82.500.000
2.16.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD <i>Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD</i>	Terlaksannya Pengelolaan Website Dinas dan Website PPID Pembantu.	Diskominfo Prov ntt	12 Ariket/Berita	15.000.000	APBD		12 Ariket/Berita	16.500.000
2.16.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				75.000.000	APBD			82.500.000
2.16.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya <i>Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga</i>	Tersedianya Peralatan Kantor, mebel, komputer, mainframe, studies audio, video	Diskominfo Prov ntt	10 Unit	75.000.000	APBD		10 Unit	82.500.000
2.16.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				679.773.920	APBD			747.751.312
2.16.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat <i>Belanja Benda Pos dan Paket /Pengiriman</i>	Tersedianya Fasilitas surat menyurat	Diskominfo Prov ntt	12 Paket	5.000.000	APBD		12 Paket	5.500.000
2.16.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik <i>Belanja Tagihan Telepon, Tagihan Air, Tagihan Listrik dan Sewa Hosting</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya jasa sumber daya komunikasi, air dan listrik - Tersedianya Jasa Sewa Hosting ntt.prov 	Diskominfo Prov ntt	<ul style="list-style-type: none"> - 12 Paket - 1 Tahun 	150.000.000	APBD		<ul style="list-style-type: none"> - 12 Paket - 1 Tahun 	165.000.000

			Rencana Awal 2024					Perkiraan Maju Tahun 2024	
No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Khusus	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan data/ Pagu Indikatif
2.16.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor <i>Belanja Jasa Tenaga Administrasi, Jasa Tenaga Kebersihan dan Jasa Tenaga Supir.</i>	Tersedianya jasa tenaga administrasi, jasa tenaga kebersihan dan jasa tenaga supir	Diskominfo Prov ntt	19 Orang/bulan	524.773.920	APBD		19 Orang/bulan	577.251.312
2.16.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				178.790.190	APBD			196.669.209
2.16.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan <i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional. - Tersedianya fasilitas bahan bakar minyak kendaraan - Tersedianya perizinan kendaraan dinas/operasional 	Diskominfo Prov ntt	<ul style="list-style-type: none"> - 5 Kendaraan Dinas - 5 Kendaraan Dinas - 5 Kendaraan Dinas 	100.000.00	APBD		<ul style="list-style-type: none"> - 5 Kendaraan Dinas - 5 Kendaraan Dinas - 5 Kendaraan Dinas 	110.000.000
2.16.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya <i>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor	Diskominfo Prov ntt	12 Paket	40.000.000	APBD		12 Paket	44.000.000
2.16.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya <i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor</i>	Terpeliharanya gedung kantor	Diskominfo Prov ntt	12 Paket	38.790.190	APBD		12 Paket	42.669.209
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK				1.482.914.700	APBD			1.742.305.400

No	Program/Kegiatan	Indikaor Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Awal 2024				Catatan Khusus	Perkiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan dana/ Pagu Indikatif	Sumbe r Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan data/ Pagu Indikatif
2.16.02.1.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi				1.482.914.700	APBD			1.742.305.400
2.16.02.1.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik <i>Rakor Bidang fominfo</i>	Rapat Koordinasi perumusan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika	✓ Kab. Belu	✓ 1 kegiatan Rakor ✓ 1 Dok Rekomendasi kebijakan	50.000.000	APBD		✓ 1 kegiatan Rakor ✓ 1 Dok Rekomendasi kebijakan	165.000.000
2.16.02.1.01.02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik <i>Dialog Interaktif Radio dan Televisi di NTT</i>	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opni dan Aspirasi Publik	Kota Kupang	5 Dokumen	70.000.000	APBD		5 Dokumen	77.000.000
2.16.02.1.01.11	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi Daerah	Jumlah dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di daerah	Kota Kupang	1 dokumen	90.000.000	APBD		1 dokumen	99.000.000
2.16.02.1.01.04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik <i>- Literasi Digital Pemanfaatan Media Sosial</i> <i>- Iklan Layanan Masyarakat</i>	Tersedianya produksi iklan layanan masyarakat	Kota Kupang	5 kali produksi berupa himbauan/ kebijakan pemerintah	30.000.000	APBD		5 kali produksi berupa himbauan/ kebijakan pemerintah	33.000.000

No	Program/Kegiatan	Indikaor Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Awal 2024				Catatan Khusus	Perkiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan dana/ Pagu Indikatif	Sumbe r Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan data/ Pagu Indikatif
2.16.02.1.01.06	Pelayanan Informasi Publik - <i>Evaluasi Indeks Keterbukaan Informasi Publik,</i> - <i>Pengelola Website PPID Utama Provinsi NTT</i> - <i>Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik di Malaka</i> - <i>Pembinaan dan Konsolidasi Penyelenggaraan PPID Utama Provinsi NTT</i> - <i>Forum Komunikasi PPID</i> - <i>Kaleidoskop Jejak Karya Gubernur dan Wakil Gubernur NTT</i>	- Indeks Keterbukaan Informasi Publik, - Terbentuknya Pengelola Website PPID Utama Provinsi NTT - Terlaksananya Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik di Malaka - Terlaksananya Pembinaan dan Konsolidasi Penyelenggaraan PPID Utama Provinsi NTT - Terlaksananya Forum Komunikasi PPID - Terlaksananya Kaleidoskop Jejak Karya Gubernur dan Wakil Gubernur NTT	Kota Kupang	- NTT menuju informative - 1 Kegiatan - 1 Kegiatan - 1 Kegiatan - 1 Kegiatan - 1 Kegiatan	92.914.700	APBD		- NTT menuju informative - 1 Kegiatan - 1 Kegiatan - 1 Kegiatan - 1 Kegiatan - 1 Kegiatan	103.305.400
2.16.02.1.01.07	Layanan Hubungan Media <i>Jumpa Pers</i>	✓ Terlaksananya Dokumentasi Publikasi Live Streaming Penyelenggaraan Pemerintah Provinsi NTT ✓ Terlaksannya Media gathering di Wilayah Kota Kupang ✓ Terlaksannya Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat	Kota Kupang	✓ 20 Kali ✓ 1 Kegiatan ✓ 1 Kabupatem	75.000.000	APBD		✓ 20 Kali ✓ 1 Kegiatan ✓ 1 Kabupatem	82.500.000

			Rencana Awal 2024					Perkiraan Maju Tahun 2024	
No	Program/Kegiatan	Indikaor Kinerja Program /Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan dana/ Pagu Indikatif	Sumbe r Dana	Catatan Khusus	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan data/ Pagu Indikatif
2.16.02.1.01.10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik <i>Bimtek Jurnalis</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksannya Kegiatan Bimtek Konten Kreator di Kota Kupang • Tersedianya SDM Konten Kreator 	Kota Kupang	1 kali kegiatan, 50 orang	75.000.000	APBD		1 kali kegiatan, 50 orang	82.500.000
2.16.02.1.01.12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas <i>Pembentukan dan Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat</i>	Terlaksannya Mitra dengan badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum	22 Kab / Kota	2 Lembaga	1.000.000.000	APBD		2 Lembaga	1.100.000.000
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA				1.648.079.860	APBD			1.896.538.066
2.16.03.1.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi				352.579.860	APBD			428.038.066
2.16.03.1.01.02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi <i>- Pengelolaan Website ntprov.go.id,</i> <i>- Pembuatan Website Dinas Kominfo</i> <i>- Pembuatan Webmail</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya Webservice Pada Website Perangkat daerah, - Tersedianya Webmail Dinas Kominfo - Tersedianya Website Dinas Kominfo - Terlaksananya Pengelolaan Website ntprov.go.id 	NTT Prov	<ul style="list-style-type: none"> - 39 Perngkat Daerah - 39 Perngkat Daerah - 1 Website - 1 Website 	150.000.000	APBD		<ul style="list-style-type: none"> - 39 Perngkat Daerah - 39 Perngkat Daerah - 1 Website - 1 Website 	165.000.000

No	Program/Kegiatan	Indikaor Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Awal 2024				Catatan Khusus	Perkiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan dana/ Pagu Indikatif	Sumbe r Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan data/ Pagu Indikatif
2.16.03.1.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah - <i>Pembangunan Jaringan LAN berbasis Fiber Optik, Pengadaan peralatan dan perlengkapan ruang NOC dan control room</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah SDM Berkualitas yang Menangani Jaringan - Tersedianya Dokumen rencana Pengembangan Integrasi Jaringan dan Sistem Penghubung TIK Lingkup Pemprov - Tersedianya Dokumen Terkait Standard dan Spesifikasi Perangkat Keras TIK di Lingkup Ppprov - Tersedianya NOC dan Perngkat Kontrol Jaringan 	Kota Kupang	<ul style="list-style-type: none"> - 2 ASN - 1 Dokumen - 1 Dokumen - 1 paket 	202.579.860	APBD		<ul style="list-style-type: none"> - 2 ASN - 1 Dokumen - 1 Dokumen - 1 paket 	263.038.066
2.16.03.1.02.01	Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	-	-	-	1.295.500.00				1.468.500.000
2.16.03.1.02.01	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi - <i>Evaluasi SPBE</i> - <i>Penyusunan Juknis Audit, Pelaksanaan Audit Infrastruktur di 38 OPD</i> - <i>Pengawasan dan pengendalian infrastruktur</i> - <i>Penyusunan tata layanan hosting/ collocation server</i> - <i>Konsolidasi dan koordinasi pelaksanaan pembangunan TIK</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Indeks SPBE - Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Aplikasi E-Absensi - Terlaksananya Pengawasan dan pengendalian Aplikasi dan Tanda Tangan Elektronik - Tersedianya Sosilalisasi Arsitektur SPBE - Terlaksananya tata Layanan Hosting/Collocaton Server 	Kota Kupang	<ul style="list-style-type: none"> - Indeks SPBE 2,7 - 1 aplikasi - 2 Aplikasi - 1 Dokumen - 1 Dokumen 	310.0000.00	APBD		<ul style="list-style-type: none"> - Indeks SPBE 2,7 - 1 aplikasi - 2 Aplikasi - 1 Dokumen - 1 Dokumen 	385.000.000

			Rencana Awal 2024					Perkiraan Maju Tahun 2024	
No	Program/Kegiatan	Indikaor Kinerja Program /Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan dana/ Pagu Indikatif	Sumbe r Dana	Catatan Khusus	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan data/ Pagu Indikatif
2.16.03.1.02.04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Tersedianya Layanan Virtual Meeting Lingkup Pemprov	Kota Kupang	39 Perangkat Daerah	50.000.000	APBD		39 Perangkat Daerah	55.000.000
2.16.03.1.02.10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	<div>- Kelancaran layanan akses internet dalam penyelenggaraan pemerintahan</div> <div>- Terlaksannya Pra Audit Internal Infrastruktur TIK Lingkup Pemprov NTT</div> <div>- Tersedianya akses dedicated</div> <div>- Tersedianya Data Perencanaan dan usulan Pembangunan BTS dan Layanan Internet di Provinsi NTT</div> <div>- Tersedianya dokumen/panduan/juknis Audit Internal Infrastruktur TIK lingkup pemprov NTT</div> <div>- Tersedianya perngkat computer pc untuk layananmanajemen bandwith</div>	Kota Kupang	<div>- 12 Bulan</div> <div>- 1 Dokumen Pelaporan</div> <div>- 70 mbps/tahun</div> <div>- 1 Dokumen</div> <div>- 1 Dokumen</div> <div>- 1 Unit</div>	935.500.000	APBD	<div>- 12 Bulan</div> <div>- 1 Dokumen Pelaporan</div> <div>- 70 mbps/tahun</div> <div>- 1 Dokumen</div> <div>- 1 Dokumen</div> <div>- 1 Unit</div>	1.028.500.000	
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL				400.000.000	APBD			498.651.780
2.20.02.1.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi				400.000.000	APBD			498.651.780

No	Program/Kegiatan	Indikaor Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Awal 2024				Catatan Khusus	Perkiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan dana/ Pagu Indikatif	Sumbe r Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan data/ Pagu Indikatif
2.20.02.1.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	<ul style="list-style-type: none"> - Terbentuknya Forum Satu Data Indonesia - Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Forum Satu Data Indonesia - Terlaksananya Pengelolaan Satu Data Indonesia dan Data Statistik Sektoral 	Kota Kupang	<ul style="list-style-type: none"> - 1 Kegiatan - 1 Kegiatan - 2 Kegiatan/Bulan/ Tahun 	200.0000.000	APBD		<ul style="list-style-type: none"> - 1 Kegiatan - 1 Kegiatan - 2 Kegiatan/Bulan/ Tahun - 	220.000.000
2.20.02.1.01.03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Terlaksananya Pengembangan Aplikasi Satu Data Statistik Sektoral	Kota Kupang	1 Aplikasi	50.000.000	APBD		1 Aplikasi	55.000.000
2.20.02.1.01.04	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Lembaga/Perangkat Daerah/Pemkab/Pemkot	Kota Kupang	10 Unit Kerja	50.000.000	APBD		10 Unit Kerja	113.651.780
2.20.02.1.01.03	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintahan Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang terintegrasi	Terlaksananya Peningkatan SDM Pengelola Satu Data Indonesia Lingkup Pemprov	Kota kupang	39 Perangkat Daerah	100.000.000	APBD		39 Perangkat Daerah	110.000.000
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI				500.000.000	APBD			550.000.000
2.21.02.1.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi				500.000.000	APBD			550.000.000

No	Program/Kegiatan	Indikaor Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Awal 2024				Catatan Khusus	Perkiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan dana/ Pagu Indikatif	Sumbe r Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan data/ Pagu Indikatif
2.21.02.1.01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Infomasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Tersusunnya Peraturan Gubernur Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Informasi Berklasifikasi Milik Pemprov. NTT	Kota Kupang	1 Peraturan Gubernur	15.000.000	APBD		1 Peraturan Gubernur	16.500.000
2.21.02.1.02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Kemanan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah kab/kota - Tercapainya Audit Internal Penyelenggaraan Persandian - Tersedianya Sumber Daya Penanganan Insiden Siber/CSIRT 	Kota Kupang	<ul style="list-style-type: none"> - 6 Kota/Kabupate n - 1 Kali Audit - 1 Workshop 	120.000.000	APBD		<ul style="list-style-type: none"> - 6 Kota/Kabupate n - 1 Kali Audit - 1 Workshop 	132.000.000
2.21.02.1.01.03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Uji Aplikasi/ITSA, hardening dan CSIRT	Kota Kupang	38 PD	80.000.000	APBD		38 PD	88.000.000
2.21.02.1.01.04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi Tanda Tangan Elektronik dan Email Sanapati - Tersedianya Alat Pendukung Utama Persandian dan Keamanan Informasi 	Kota Kupang	<ul style="list-style-type: none"> - 38 Perangkat Daerah - 1 Paket 	285.000.000	APBD		<ul style="list-style-type: none"> - 38 Perangkat Daerah - 1 Paket 	315.500.000

BAB. V PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 menjadi satu kesatuan dari rangkaian perencanaan pembangunan sesuai dengan Undang-Undang tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas. Kegiatan, indikator, target kinerja dan pagu anggaran yang disusun masih bersifat indikatif yang harus dijabarkan lebih lanjut kedalam Rencana Kerja Anggaran TA. 2024.

V.1 Catatan Penting yang Perlu Mendapat Perhatian

Berdasarkan pengalaman pelaksanaan program dan kegiatan tahun-tahun yang lalu ada beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian pada pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024 sebagai berikut :

1. Bidang mengalami kesulitan dalam menyesuaikan Program/Kegiatan berdasarkan pagu indikatif yang ada karena sesungguhnya setiap bidang dan seksi telah menyusun Rencana Program/Kegiatan tahun 2024 untuk mendukung terealisasinya Rencana Kerja Tahunan dan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika namun secara pagu indikatif tidak terakomodir dalam pagu indikatif yang disediakan.
2. Melakukan proses perencanaan dengan lebih seksama, antara lain dengan menggelar review triwulanan.
3. Meningkatkan koordinasi dengan semua pegawai di setiap Bidang di Dinas Komunikasi dan Informatika terutama untuk meningkatkan kualitas sarana prasarana pendukung kerja, yaitu dengan pemeliharaan baik komputer, kendaraan, sarana prasarana kantor maupun gedung, karena kerusakan yang tidak bisa diprediksi sehingga kebutuhan perbaikan sarana dan prasarana sulit dianggarkan dengan tepat.

V.2 Kaidah – kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja – SKPD) dan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara SKPD Tahun 2024. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah – kaidah dalam pelaksanaannya, yaitu :

1. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah (Renja) SKPD ini disusun dengan mengikuti pendekatan baru dalam penganggaran, sebagaimana yang telah diamanatkan dalam peraturan perundang – undangan.
2. Dalam upaya Sinkronisasi dan Sinergitas pelaksanaan setiap program yang bersumber dari APBD, maka setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib membuat Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja – SKPD).
3. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024, maka Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP4D) berkewajiban untuk melakukan pemantauan terhadap penjabaran dan Sinergitas RKPD Tahun 2024 kedalam Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja – SKPD) dan Kebijakan Umum APBD Tahun 2024 terutama yang berkaitan tentang kebijakan daerah dalam menangani pandemi *Covid-19* serta Prioritas dan Pagu Indikatif SKPD Tahun 2024.
4. Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah (Renja) SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur TA. 2024 ini memuat usulan Program/Kegiatan yang pendanaannya bersifat indikatif.
5. Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah (Renja) SKPD, di dalam proses penyusunannya memperhatikan dokumen - dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya (RKP, RPJMN, RPJPD Provinsi, RPJMD Provinsi, RKPD Provinsi, dan Renstra Dinas)

V.3 Rencana Tindak Lanjut

1. Menyiapkan segala dokumen pendukung terkait pembuatan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) yaitu RKA dan TOR untuk setiap Program/Kegiatan.
2. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan SKPD terkait untuk pembahasan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD).

Demikian Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika TA 2024 yang merupakan acuan bagi penyusunan rencana dan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika TA 2024.

PLT KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,



Ir. Yandy Lasi, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19650819 199401 1 001